

A large, ornate, dark green frame with intricate gold floral and geometric patterns surrounds the title. The frame has a pointed top and bottom, with decorative flourishes at the corners and midpoints of the sides.

KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM

A horizontal decorative border with a repeating gold floral pattern on a dark green background runs across the width of the page, positioned above the author's name.

PROF. DR. H. ANIS FAUZI, M.SI.

KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM

Prof. Dr. H. Anis Fauzi, M.SI.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002

Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana paling lama 7 (tahun) dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM

Prof. Dr. H. Anis Fauzi, M.SI.



YAYASAN PUTRA ADI DHARMA

KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM

Penulis :

Prof. Dr. H. Anis Fauzi, M.SI.

ISBN : 978-634-7209-40-5

IKAPI : No.498/JBA/2024

Editor :

Afifatun Ni'mah

Penyunting :

Yayasan Putra Adi Dharma

Desain sampul dan Tata letak

Yayasan Putra Adi Dharma

Penerbit :

Yayasan Putra Adi Dharma

Redaksi :

Wahana Pondok Ungu Blok B9 no 1, Bekasi

Office Marketing Jl. Gedongkuning, Banguntapan Bantul, Yogyakarta

Office Yogyakarta : 087777899993

Marketing : 088221740145

Instagram : @ypad_penerbit

Website : <https://ypad.store>

Email : teampenerbit@ypad.store

Cetakan Pertama April 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini yang berjudul "**Kebijakan Pendidikan Islam**" dapat tersusun dan hadir di hadapan pembaca. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah di jalan-Nya.

Buku ini hadir sebagai salah satu upaya untuk memperkaya khazanah literatur dalam bidang pendidikan Islam, khususnya terkait kebijakan yang mendasari sistem pendidikan Islam di berbagai konteks. Pendidikan Islam bukan hanya sekadar proses transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter dan akhlak mulia yang berlandaskan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam memegang peranan strategis dalam menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas intelektual, tetapi juga kuat dalam spiritual dan sosial.

Dalam buku ini, penulis berupaya mengurai konsep dasar kebijakan pendidikan Islam dengan pendekatan teoritis dan praktis. Pembahasan meliputi landasan filosofis, historis, dan normatif kebijakan pendidikan Islam, prinsip-prinsip dasar yang melandasinya, serta implementasi kebijakan dalam berbagai jenjang pendidikan. Selain itu, buku ini juga mengulas tantangan dan peluang yang dihadapi pendidikan Islam dalam era modern yang sarat dengan perkembangan teknologi dan globalisasi.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif dari para pembaca sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga kehadiran buku ini dapat memberikan manfaat bagi para akademisi, praktisi pendidikan, mahasiswa, dan seluruh pihak yang peduli terhadap kemajuan pendidikan Islam.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa meridhai setiap langkah kita dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB 1	1
KONSEP DASAR KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM.....	1
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Pendidikan Islam	1
B. Landasan Filosofis Pendidikan Islam	3
C. Prinsip-Prinsip dalam Kebijakan Pendidikan Islam	4
D. Tujuan dan Sasaran Pendidikan Islam	6
BAB 2	8
SEJARAH PERKEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM	8
A. Kebijakan Pendidikan Islam pada Masa Klasik.....	8
B. Kebijakan Pendidikan Islam pada Masa Pertengahan	10
C. Pembaruan Kebijakan Pendidikan Islam di Era Modern.....	12
D. Pendidikan Islam di Era Kontemporer.....	14
BAB 3	17
LANDASAN HUKUM DAN REGULASI PENDIDIKAN ISLAM	17
A. Al-Qur'an dan Hadis sebagai Dasar Kebijakan.....	19
B. Undang-Undang dan Peraturan Pendidikan Islam di Indonesia	21
C. Peran Kementerian Agama dalam Kebijakan Pendidikan Islam	23
D. Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam di Berbagai Negara	26
BAB 4	29
KURIKULUM DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM	29
A. Konsep Kurikulum Pendidikan Islam.....	31
B. Kurikulum Madrasah dan Pesantren.....	33
C. Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Kurikulum Nasional.....	35
D. Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam	37
BAB 5	41
LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAN KEBIJAKANNYA	41
A. Madrasah Struktur dan Kebijakan	43
B. Pesantren Model Pendidikan dan Kebijakannya.....	45
C. Perguruan Tinggi Islam dan Standarisasi Pendidikan.....	48

D. Peran Lembaga Pendidikan Islam dalam Masyarakat	51
BAB 6	56
PERAN GURU DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM	56
A. Kualifikasi dan Kompetensi Guru dalam Pendidikan Islam	56
B. Kebijakan Rekrutmen dan Pengembangan Guru Madrasah	58
C. Metode Pengajaran dalam Pendidikan Islam	59
D. Prospek Karier Guru Pendidikan Islam	61
BAB 7	63
PEMBIAYAAN DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM	63
A. Sumber Dana Pendidikan Islam	64
B. Peran Pemerintah dalam Pendanaan Pendidikan Islam	66
C. Peran Wakaf dan Zakat dalam Pendidikan Islam	67
D. Efisiensi dan Transparansi Pengelolaan Keuangan	69
BAB 8	71
TEKNOLOGI DAN INOVASI DALAM PENDIDIKAN ISLAM	71
A. Pemanfaatan Teknologi dalam Pendidikan Islam	71
B. E-Learning dan Digitalisasi Pendidikan Islam	73
C. Integrasi AI dalam Kebijakan Pendidikan Islam	74
D. Inovasi Model Pembelajaran Berbasis Islam	75
BAB 9	77
TANTANGAN GLOBAL DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM	77
A. Isu Globalisasi dan Pengaruhnya terhadap Pendidikan Islam	77
B. Radikalisme dan Moderasi dalam Pendidikan Islam	79
C. Adaptasi Pendidikan Islam terhadap Revolusi Industri 4.0	81
D. Kebijakan Pendidikan Islam dalam Masyarakat Multikultural	83
BAB 10	86
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM	86
A. Reformasi dan Transformasi Pendidikan Islam	86
B. Sinergi Pendidikan Islam dengan Pendidikan Umum	87
C. Rekomendasi Kebijakan untuk Kemajuan Pendidikan Islam	88
D. Visi Pendidikan Islam dalam Membangun Peradaban	89
DAFTAR PUSTAKA	91
PROFIL PENULIS	93

SINOPSIS97

BAB 1

KONSEP DASAR KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM

Pendidikan Islam merupakan fondasi utama dalam membentuk generasi yang berkarakter mulia, cerdas, dan berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagai sistem pendidikan yang tidak hanya menitikberatkan aspek intelektual tetapi juga moral dan spiritual, pendidikan Islam memerlukan kebijakan yang mampu mengakomodasi nilai-nilai tersebut dalam tatanan kehidupan modern.

"**Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan Islam**" hadir sebagai upaya untuk mengupas landasan filosofis, historis, dan normatif yang melatarbelakangi kebijakan dalam sistem pendidikan Islam. Buku ini menguraikan prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan Islam yang relevan dengan kebutuhan zaman, tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar yang menjadi ciri khasnya.

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Pendidikan Islam

Kebijakan pendidikan Islam merupakan seperangkat keputusan, aturan, dan pedoman yang dirumuskan untuk mengatur, mengelola, dan mengarahkan sistem pendidikan Islam agar berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kebijakan ini menjadi dasar dalam penyusunan kurikulum, metode pembelajaran, manajemen pendidikan, serta evaluasi yang diterapkan dalam lembaga pendidikan Islam. Secara etimologis, kata "kebijakan" berasal dari kata "bijak" yang berarti arif atau pandai dalam mengambil keputusan. Dalam konteks pendidikan Islam, kebijakan harus berlandaskan pada nilai-nilai syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Selain itu, kebijakan tersebut juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan sosial, budaya, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman.

Ruang lingkup kebijakan pendidikan Islam mencakup berbagai aspek penting dalam sistem pendidikan. Pertama, landasan filosofis dan normatif yang menjadi pijakan utama dalam merumuskan kebijakan, yaitu nilai-nilai tauhid, akhlak, dan keseimbangan antara aspek duniawi dan ukhrawi. Kedua, kebijakan terkait kurikulum pendidikan Islam yang harus memadukan antara pendidikan agama, ilmu pengetahuan umum, dan pengembangan karakter, sehingga mampu membentuk insan kamil yang cerdas secara intelektual, spiritual, dan sosial. Ketiga, metodologi dan strategi pembelajaran yang diatur dalam kebijakan harus efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti penggunaan metode talaqqi, ceramah, diskusi, dan pemanfaatan teknologi pendidikan yang mendukung proses belajar-mengajar.

Selanjutnya, kebijakan pendidikan Islam juga mencakup aspek manajemen dan administrasi pendidikan, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi lembaga pendidikan Islam. Ini termasuk pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, serta sarana dan prasarana pendidikan. Selain itu, peningkatan kualitas tenaga pendidik menjadi bagian integral dari kebijakan pendidikan Islam. Guru dan tenaga kependidikan harus mendapatkan pelatihan, sertifikasi, serta program peningkatan kompetensi agar mampu melaksanakan tugas secara profesional dan efektif.

Penjaminan mutu dan evaluasi pendidikan juga menjadi ruang lingkup penting dalam kebijakan pendidikan Islam. Sistem penilaian dan akreditasi harus diterapkan untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan Islam memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dan berakhlak mulia.

Tujuan utama dari kebijakan pendidikan Islam adalah untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki keimanan yang kuat, akhlak mulia, dan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga

eksistensi pendidikan Islam di tengah arus globalisasi dan modernisasi tanpa mengorbankan nilai-nilai luhur yang menjadi fondasinya.

B. Landasan Filosofis Pendidikan Islam

Landasan filosofis pendidikan Islam merupakan dasar pemikiran yang menjadi pijakan dalam merumuskan tujuan, kurikulum, metode, dan seluruh aspek dalam proses pendidikan Islam. Filosofi ini tidak hanya berorientasi pada pengembangan intelektual semata, tetapi juga mencakup aspek spiritual, moral, dan sosial yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Pendidikan Islam memandang manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki potensi fitrah, yaitu kecenderungan untuk menerima kebaikan dan kebenaran. Oleh karena itu, pendidikan Islam bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi manusia secara holistik dan seimbang, mencakup aspek jasmani, akal, dan ruhani, agar mampu mencapai derajat insan kamil atau manusia paripurna.

Landasan filosofis pendidikan Islam bersumber dari ajaran Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman utama dalam kehidupan. Al-Qur'an mengajarkan pentingnya ilmu pengetahuan dan mendorong manusia untuk berpikir, belajar, dan mengembangkan diri. Salah satu ayat yang menjadi landasan utama pendidikan Islam adalah QS. Al-'Alaq ayat 1-5 yang menegaskan pentingnya membaca dan menuntut ilmu. Selain itu, hadits Rasulullah SAW juga menguatkan prinsip ini, seperti sabdanya, *"Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim, laki-laki maupun perempuan."* Dengan demikian, pendidikan dalam Islam bukan sekadar aktivitas akademik, tetapi juga ibadah yang bernilai pahala.

Secara filosofis, pendidikan Islam juga berlandaskan pada konsep tauhid, yang menegaskan bahwa segala aspek kehidupan, termasuk pendidikan, harus diarahkan untuk mengabdikan kepada Allah SWT. Konsep ini membentuk pandangan holistik dalam pendidikan, di mana aspek intelektual tidak dipisahkan dari nilai-nilai spiritual. Selain itu, pendidikan Islam

memandang manusia sebagai khalifah di muka bumi yang memiliki tanggung jawab sosial untuk menjaga dan memakmurkan alam semesta. Oleh karena itu, pendidikan harus membekali peserta didik dengan nilai-nilai etika, moral, dan tanggung jawab sosial yang kuat.

Aspek lain dari landasan filosofis pendidikan Islam adalah prinsip keseimbangan antara dunia dan akhirat. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mencapai kesuksesan duniawi, seperti karier dan materi, tetapi juga membimbing individu untuk meraih kebahagiaan ukhrawi. Konsep ini menempatkan pendidikan Islam sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan holistik yang mencakup kebahagiaan di dunia dan akhirat.

C. Prinsip-Prinsip dalam Kebijakan Pendidikan Islam

Kebijakan pendidikan Islam dibangun di atas prinsip-prinsip fundamental yang bersumber dari ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, yang bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang holistik, seimbang, dan berorientasi pada pembentukan manusia paripurna. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam merancang, mengelola, dan mengevaluasi berbagai aspek pendidikan Islam agar mampu menjawab tuntutan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai inti ajaran Islam.

Salah satu prinsip utama dalam kebijakan pendidikan Islam adalah **tauhid**. Konsep ini menegaskan bahwa pendidikan harus diarahkan untuk mengembangkan potensi manusia dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT. Tauhid menjadi inti dari seluruh aktivitas pendidikan, memastikan bahwa ilmu yang diajarkan tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang kuat. Prinsip ini mendorong peserta didik untuk menyadari bahwa tujuan akhir dari proses belajar adalah mencapai keridhaan Allah SWT.

Prinsip kedua adalah **keseimbangan (tawazun)** antara aspek intelektual, emosional, spiritual, dan fisik. Pendidikan Islam tidak hanya fokus pada pengembangan kecerdasan akademik, tetapi juga membentuk karakter dan akhlak mulia. Konsep ini memastikan bahwa

peserta didik tumbuh menjadi individu yang seimbang dalam berpikir, bersikap, dan bertindak, sehingga mampu menjalani kehidupan duniawi tanpa mengabaikan tanggung jawab ukhrawi.

Prinsip **universalitas (syumuliyah)** juga menjadi dasar penting dalam kebijakan pendidikan Islam. Pendidikan Islam bersifat inklusif dan mencakup semua aspek kehidupan manusia. Konsep ini mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan bersifat universal dan dapat dipelajari oleh siapa saja tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun budaya. Pendidikan Islam juga mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum, menghapus dikotomi antara keduanya, sehingga peserta didik dapat memahami keterkaitan antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam.

Selanjutnya, prinsip **humanisasi (insaniyah)** menjadi elemen penting dalam kebijakan pendidikan Islam. Pendidikan dipandang sebagai sarana untuk memanusiakan manusia, mengembangkan potensi fitrah, dan membentuk individu yang berakhlak mulia. Konsep ini menempatkan manusia sebagai makhluk mulia yang diberi akal dan hati untuk membedakan yang benar dan salah. Pendidikan harus menghargai martabat manusia dan memberikan ruang bagi peserta didik untuk berkembang sesuai potensi dan bakatnya.

Prinsip **keadilan ('adalah)** juga menjadi pijakan dalam kebijakan pendidikan Islam. Pendidikan harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, baik berdasarkan gender, status sosial, maupun latar belakang ekonomi. Konsep keadilan ini memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Terakhir, prinsip **dinamisme dan fleksibilitas** mengajarkan bahwa kebijakan pendidikan Islam harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa mengorbankan nilai-nilai inti ajaran Islam. Pendidikan Islam harus terbuka terhadap inovasi dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi, selama tidak bertentangan dengan syariat. Prinsip ini

memungkinkan pendidikan Islam untuk terus relevan dan responsif terhadap tantangan globalisasi dan modernisasi.

D. Tujuan dan Sasaran Pendidikan Islam

Tujuan pendidikan Islam merupakan cerminan dari nilai-nilai ajaran Islam yang bertujuan untuk membentuk manusia seutuhnya, yaitu individu yang berkembang secara optimal dalam aspek intelektual, spiritual, moral, dan sosial. Pendidikan Islam tidak hanya bertujuan untuk mencetak manusia yang cerdas dan terampil, tetapi juga insan yang memiliki akhlak mulia, keimanan yang kokoh, dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Dengan kata lain, pendidikan Islam bertujuan membentuk insan kamil, yaitu manusia paripurna yang mampu menjalankan fungsi sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi.

Secara umum, tujuan utama pendidikan Islam adalah untuk mendekatkan manusia kepada Allah SWT melalui proses pengembangan potensi fitrah yang dimilikinya. Hal ini mencakup pengembangan aspek ruhaniyah (spiritual), akliyah (intelektual), dan jasmaniyah (fisik) secara seimbang. Pendidikan Islam mendorong peserta didik untuk memiliki keimanan yang kuat, pemahaman ilmu pengetahuan yang luas, serta akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendidikan Islam juga bertujuan membentuk individu yang sadar akan tanggung jawab sosialnya, berkontribusi positif terhadap masyarakat, serta menjaga harmoni antara kehidupan dunia dan akhirat.

Sasaran pendidikan Islam mencakup berbagai aspek yang saling terkait. Pertama, **sasaran individu**, di mana pendidikan diarahkan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara holistik. Pendidikan bertujuan membentuk individu yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial yang seimbang. Peserta didik diharapkan mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, namun tetap berlandaskan nilai-nilai Islam dalam setiap tindakannya.

Kedua, **sasaran sosial**, yang mengarahkan pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang madani, adil, dan beradab. Pendidikan Islam bertujuan membentuk generasi yang mampu menjaga nilai-nilai sosial, mempererat ukhuwah Islamiyah, dan berkontribusi dalam membangun masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada perkembangan individu, tetapi juga menciptakan perubahan positif dalam tatanan sosial.

Ketiga, **sasaran moral dan spiritual**, yang menjadi inti dari pendidikan Islam. Peserta didik diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual dalam setiap aspek kehidupan. Pendidikan Islam mengajarkan konsep ihsan, yaitu berbuat kebaikan dengan penuh kesadaran akan pengawasan Allah SWT. Dengan nilai ini, peserta didik diharapkan menjadi pribadi yang jujur, amanah, rendah hati, dan peduli terhadap sesama.

Pendidikan Islam juga memiliki **sasaran global**, yaitu membentuk individu yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam. Pendidikan harus mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi, sambil tetap menjaga identitas dan integritas keislaman.

BAB 2

SEJARAH PERKEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM

Sejarah perkembangan kebijakan pendidikan Islam mencerminkan perjalanan panjang umat Islam dalam membangun sistem pendidikan yang kokoh dan relevan di setiap zaman. Sejak masa Rasulullah SAW, pendidikan Islam telah menjadi fondasi utama dalam membentuk masyarakat Muslim yang berilmu dan berakhlak mulia. Pada masa awal Islam, pendidikan bersifat informal dan berpusat di masjid, yang berfungsi tidak hanya sebagai tempat ibadah tetapi juga sebagai pusat kegiatan pendidikan dan sosial. Rasulullah SAW sendiri menjadi pendidik utama yang mengajarkan Al-Qur'an, akhlak, dan berbagai ilmu pengetahuan dasar kepada para sahabat. Lembaga pendidikan pertama dalam Islam adalah "**Dar al-Arqam**", yang menjadi pusat pembelajaran bagi para sahabat di masa dakwah Islamiyah awal.

A. Kebijakan Pendidikan Islam pada Masa Klasik

Kebijakan pendidikan Islam pada masa klasik merujuk pada periode awal perkembangan Islam yang dimulai sejak masa Rasulullah SAW hingga masa keemasan Dinasti Abbasiyah. Masa ini menjadi fondasi utama dalam membangun sistem pendidikan Islam yang terstruktur dan berlandaskan pada nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah. Pendidikan pada masa klasik bersifat integral, menggabungkan antara aspek spiritual, intelektual, dan sosial dalam proses pembelajaran.

Pada masa Rasulullah SAW, kebijakan pendidikan bersifat sederhana namun sangat efektif. Pendidikan berfokus pada penanaman nilai-nilai tauhid, akhlak mulia, dan pemahaman Al-Qur'an. Masjid menjadi pusat utama kegiatan pendidikan, di mana Rasulullah sendiri berperan sebagai pendidik utama. Lembaga pendidikan pertama yang dikenal dalam sejarah Islam adalah **Dar al-Arqam**, tempat para sahabat belajar Al-Qur'an secara rahasia sebelum

Islam diterima secara luas di Makkah. Selain itu, Rasulullah SAW juga mendirikan "**Suffah**" di Masjid Nabawi sebagai tempat tinggal dan belajar bagi para sahabat yang ingin memperdalam ilmu agama.

Pada masa **Khulafaur Rasyidin**, kebijakan pendidikan mulai mengalami perkembangan. Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab mendorong penyebaran pendidikan Islam ke wilayah yang baru ditaklukkan dengan mengirim para sahabat sebagai guru untuk mengajarkan Al-Qur'an dan ajaran Islam. Khalifah Utsman bin Affan berperan penting dalam menyusun mushaf Al-Qur'an yang baku, sehingga memudahkan proses pembelajaran di berbagai wilayah kekuasaan Islam. Pada masa Ali bin Abi Thalib, pendidikan mulai mengembangkan diskusi ilmiah yang melibatkan ilmu bahasa, fiqh, dan tafsir Al-Qur'an.

Periode **Dinasti Umayyah** (661–750 M) menjadi tonggak penting dalam perkembangan kebijakan pendidikan Islam yang lebih formal dan sistematis. Di masa ini, pendidikan tidak hanya fokus pada ilmu agama tetapi mulai mengakomodasi ilmu pengetahuan umum. Madrasah dan kuttab (sekolah dasar) mulai bermunculan, mengajarkan membaca, menulis, serta ilmu hitung dasar. Khalifah Abdul Malik bin Marwan memperkenalkan sistem administrasi pendidikan yang lebih terorganisir dan mendorong penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar pendidikan di seluruh wilayah kekuasaan Islam.

Masa keemasan pendidikan Islam terjadi pada era **Dinasti Abbasiyah** (750–1258 M), terutama di bawah pemerintahan Khalifah Harun Al-Rasyid dan Al-Ma'mun. Kebijakan pendidikan pada masa ini mencapai puncaknya dengan berdirinya **Baitul Hikmah** di Baghdad, yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia Islam. Baitul Hikmah berfungsi sebagai perpustakaan, pusat penelitian, dan lembaga penerjemahan karya-karya ilmiah dari Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Pendidikan Islam pada masa Abbasiyah mengalami

kemajuan pesat dalam bidang filsafat, matematika, astronomi, kedokteran, dan ilmu sosial, menjadikan Baghdad sebagai pusat intelektual dunia.

Selain Baghdad, kota-kota seperti **Cordoba** dan **Toledo** di Andalusia juga berkembang sebagai pusat pendidikan Islam yang maju. Andalusia menjadi contoh sukses integrasi pendidikan agama dan ilmu umum, menarik pelajar dari berbagai belahan dunia. Kebijakan pendidikan di wilayah ini bersifat inklusif dan multikultural, memungkinkan pertukaran ilmu antara umat Islam, Kristen, dan Yahudi.

Pada masa klasik ini, pendidikan Islam memiliki karakteristik holistik, menggabungkan aspek agama dan duniawi dalam satu sistem pendidikan yang terpadu. Kebijakan pendidikan bersifat inklusif, terbuka terhadap ilmu pengetahuan dari berbagai peradaban, namun tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam. Model pendidikan klasik ini menjadi cikal bakal sistem pendidikan Islam yang berpengaruh hingga masa kini.

B. Kebijakan Pendidikan Islam pada Masa Pertengahan

Kebijakan pendidikan Islam pada masa pertengahan merujuk pada periode pasca-keemasan Dinasti Abbasiyah, sekitar abad ke-13 hingga abad ke-18 Masehi. Masa ini ditandai oleh dinamika sosial-politik yang cukup kompleks, termasuk melemahnya kekuasaan pusat di Baghdad akibat serangan Mongol pada tahun 1258 M, serta munculnya kekuatan-kekuatan politik baru seperti Dinasti Mamluk di Mesir, Dinasti Utsmaniyah di Turki, Dinasti Safawi di Persia, dan Dinasti Mughal di India. Walaupun menghadapi tantangan besar, pendidikan Islam pada masa pertengahan tetap mengalami perkembangan melalui berbagai kebijakan dan pembentukan lembaga-lembaga pendidikan yang berpengaruh.

Salah satu ciri utama kebijakan pendidikan Islam pada masa ini adalah semakin berkembangnya **madrasah** sebagai institusi pendidikan formal. Madrasah memainkan peran sentral dalam mengajarkan ilmu agama seperti fiqh, tafsir, hadits, dan kalam, serta ilmu umum

seperti filsafat, matematika, dan astronomi. Madrasah pertama yang dikenal dalam sejarah adalah **Madrasah Nizamiyah** yang didirikan oleh Nizam al-Mulk di Baghdad pada abad ke-11 M. Keberhasilan model madrasah ini menginspirasi pendirian madrasah di berbagai wilayah kekuasaan Islam selama masa pertengahan, memperkuat sistem pendidikan Islam yang terstruktur dan sistematis.

Di wilayah Mesir, terutama di bawah kekuasaan Dinasti Mamluk, pendidikan Islam berkembang pesat. Salah satu lembaga pendidikan ternama pada masa ini adalah **Universitas Al-Azhar** di Kairo yang berdiri sejak abad ke-10 M dan berkembang menjadi pusat studi Islam terkemuka di dunia. Al-Azhar menjadi pusat pengkajian ilmu agama, bahasa Arab, serta berbagai disiplin ilmu lainnya. Kebijakan pendidikan pada masa Mamluk mendorong pembiayaan pendidikan melalui wakaf, memungkinkan akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat.

Sementara itu, di wilayah Turki Utsmani, kebijakan pendidikan mengalami perkembangan signifikan dengan adanya sistem pendidikan "**madrasah Utsmaniyah**". Pendidikan di kekaisaran ini mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum, termasuk hukum, kedokteran, dan teknik. Kekhalifahan Utsmani mendirikan berbagai madrasah dan universitas di kota-kota besar seperti Istanbul, Bursa, dan Edirne. Selain itu, pendidikan militer juga mendapatkan perhatian besar melalui pendirian akademi militer untuk memperkuat kekuatan pertahanan kekaisaran.

Di dunia Islam bagian timur, Dinasti Mughal di India turut berkontribusi dalam pengembangan pendidikan Islam. Penguasa Mughal seperti Akbar dan Aurangzeb mendirikan madrasah dan lembaga pendidikan tinggi yang mengajarkan ilmu agama serta sastra Persia dan ilmu pengetahuan lainnya. Perpustakaan besar didirikan di istana-istana Mughal, menunjukkan tingginya perhatian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.

Namun, masa pertengahan juga menyaksikan munculnya dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum dalam kebijakan pendidikan Islam. Madrasah cenderung lebih fokus pada pengajaran ilmu-ilmu agama, sementara ilmu pengetahuan umum mulai terpinggirkan. Hal ini menyebabkan kemunduran dalam perkembangan sains dan teknologi di dunia Islam, yang sebelumnya sangat maju pada masa klasik.

Selain pendidikan formal, sistem pendidikan non-formal seperti **pesantren** di Indonesia dan **zawiyah** di Afrika Utara juga berkembang pesat pada masa ini. Pesantren menjadi pusat pendidikan Islam tradisional yang mengajarkan Al-Qur'an, fiqh, tasawuf, dan bahasa Arab. Model pendidikan ini berkontribusi besar dalam penyebaran Islam ke wilayah Asia Tenggara.

Kebijakan pendidikan Islam pada masa pertengahan juga diwarnai oleh pemanfaatan sistem wakaf untuk mendukung operasional lembaga pendidikan. Wakaf menjadi sumber utama pendanaan madrasah, masjid, dan perpustakaan, memungkinkan pendidikan dapat diakses secara luas oleh masyarakat.

C. Pembaruan Kebijakan Pendidikan Islam di Era Modern

Pembaruan kebijakan pendidikan Islam di era modern muncul sebagai respons terhadap tantangan globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan, serta kebutuhan masyarakat Muslim untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan perkembangan zaman. Era modern yang dimulai sekitar abad ke-19 ditandai oleh munculnya gerakan pembaruan (islah) di berbagai belahan dunia Islam, yang mendorong revitalisasi sistem pendidikan Islam agar lebih relevan, progresif, dan mampu bersaing di tingkat global tanpa kehilangan identitas keislamannya.

Salah satu pemikir utama yang berperan dalam pembaruan pendidikan Islam adalah **Jamaluddin al-Afghani** (1838–1897), yang mengusung gagasan Pan-Islamisme dan pentingnya mengadopsi ilmu pengetahuan modern dalam sistem pendidikan Islam. Pemikir lain seperti **Muhammad Abduh** di Mesir mengadvokasi pentingnya ijtihad dalam pendidikan,

mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum, serta menekankan rasionalitas dan moralitas dalam kurikulum pendidikan Islam. Melalui reformasi yang dipelopori oleh Abduh di Universitas Al-Azhar, kurikulum diperluas untuk mencakup ilmu-ilmu modern seperti matematika, sains, dan bahasa asing, di samping ilmu-ilmu agama tradisional.

Di dunia Islam bagian Asia Tenggara, pembaruan pendidikan Islam juga mengalami perkembangan signifikan. Di Indonesia, muncul tokoh pembaharu seperti **Ahmad Dahlan** (pendiri Muhammadiyah) dan **Hasyim Asy'ari** (pendiri Nahdlatul Ulama) yang membawa gagasan modernisasi pendidikan Islam. Ahmad Dahlan mendorong integrasi pendidikan agama dengan ilmu pengetahuan umum melalui pendirian sekolah-sekolah Muhammadiyah yang memadukan kurikulum agama dan ilmu modern. Sementara Hasyim Asy'ari mempertahankan tradisi pesantren namun membuka ruang bagi pengajaran ilmu umum untuk memperkaya wawasan santri.

Pembaruan kebijakan pendidikan Islam juga terlihat melalui pendirian berbagai institusi pendidikan tinggi Islam di berbagai negara. Di Indonesia, berdirinya **Institut Agama Islam Negeri (IAIN)** yang kemudian berkembang menjadi **Universitas Islam Negeri (UIN)** menjadi tonggak penting dalam modernisasi pendidikan Islam. Lembaga-lembaga ini mengusung konsep integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum dalam kurikulum, menciptakan lulusan yang tidak hanya memahami ajaran Islam tetapi juga kompeten dalam bidang sains, teknologi, dan ilmu sosial.

Di tingkat kebijakan, pemerintah di berbagai negara Muslim mulai mengadopsi pendekatan pendidikan yang lebih inklusif dan terpadu. Di Indonesia, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mengakui pendidikan Islam sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan penguatan madrasah agar setara dengan sekolah umum melalui kurikulum terpadu yang mencakup ilmu agama dan ilmu umum.

Pembaruan kebijakan pendidikan Islam di era modern juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Digitalisasi pendidikan membuka peluang baru dalam pengajaran dan pembelajaran Islam, mulai dari e-learning, platform pembelajaran daring, hingga pemanfaatan media sosial sebagai sarana dakwah dan edukasi. Hal ini memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan Islam yang berkualitas, terutama di daerah-daerah terpencil.

Selain itu, pendekatan pedagogis dalam pendidikan Islam turut mengalami pembaruan. Metode pengajaran tradisional yang berfokus pada hafalan mulai diperkaya dengan pendekatan yang lebih interaktif, kritis, dan partisipatif. Kurikulum pendidikan Islam modern kini lebih menekankan pengembangan keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, dan kreatif, sejalan dengan tuntutan abad ke-21.

D. Pendidikan Islam di Era Kontemporer

Pendidikan Islam di era kontemporer menghadapi tantangan dan peluang yang kompleks seiring dengan pesatnya perkembangan globalisasi, kemajuan teknologi informasi, serta dinamika sosial-budaya yang semakin beragam. Era ini, yang berlangsung dari akhir abad ke-20 hingga saat ini, menuntut sistem pendidikan Islam untuk terus beradaptasi agar tetap relevan dalam membentuk generasi Muslim yang mampu berperan aktif di kancah global tanpa kehilangan identitas keislamannya.

Salah satu ciri utama pendidikan Islam di era kontemporer adalah **integrasi ilmu agama dan ilmu umum** dalam kurikulum pendidikan. Konsep ini bertujuan menghapus dikotomi yang selama ini memisahkan antara pendidikan agama dan pendidikan sekuler. Lembaga-lembaga pendidikan tinggi Islam seperti **Universitas Islam Negeri (UIN)** di Indonesia telah mengembangkan pendekatan ini dengan mengintegrasikan studi keislaman bersama ilmu pengetahuan modern seperti sains, teknologi, ekonomi, dan ilmu sosial. Model pendidikan ini

diharapkan mampu melahirkan lulusan yang memiliki pemahaman agama yang mendalam sekaligus keterampilan yang relevan dengan tuntutan zaman.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga membawa transformasi besar dalam sistem pendidikan Islam. Konsep **e-learning**, **kelas virtual**, dan penggunaan platform pembelajaran daring telah menjadi bagian dari sistem pendidikan, memungkinkan akses yang lebih luas dan fleksibel bagi para pelajar. Berbagai aplikasi Al-Qur'an digital, kelas tafsir daring, hingga kursus bahasa Arab berbasis aplikasi kini dapat diakses oleh masyarakat global. Fenomena ini membuka peluang besar bagi pendidikan Islam untuk menjangkau audiens yang lebih luas, termasuk di daerah terpencil dan di kalangan diaspora Muslim.

Selain itu, pendidikan Islam di era kontemporer juga menunjukkan keterbukaan dalam mengadopsi pendekatan pedagogis modern. Metode pembelajaran kini lebih berorientasi pada pengembangan **keterampilan abad ke-21** seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Kurikulum pendidikan Islam tidak lagi sekadar berfokus pada hafalan teks keagamaan, tetapi juga mendorong pemahaman kontekstual, analisis mendalam, dan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Isu-isu global seperti **moderasi beragama**, **pluralisme**, dan **hak asasi manusia** juga menjadi bagian dari diskursus pendidikan Islam di era kontemporer. Pendidikan Islam berperan penting dalam membangun masyarakat yang toleran, damai, dan inklusif, terutama di tengah meningkatnya isu radikalisme dan intoleransi di beberapa wilayah. Konsep **Islam Wasathiyah** (Islam moderat) menjadi salah satu pendekatan yang ditekankan dalam kurikulum pendidikan Islam untuk mengajarkan nilai-nilai keseimbangan, toleransi, dan kedamaian.

Di Indonesia, pendidikan Islam di era kontemporer mengalami berbagai pembaruan kebijakan yang mendukung penguatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan. Pemerintah melalui Kementerian Agama telah mengimplementasikan program-program seperti penguatan

madrasah unggulan, pengembangan **kurikulum integratif**, serta peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan berbasis teknologi. Selain itu, pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional juga mengalami transformasi dengan hadirnya program "**pesantren modern**" yang mengintegrasikan kurikulum agama dan umum, serta membekali santri dengan keterampilan hidup (life skills) yang relevan dengan tuntutan zaman.

Pendidikan Islam di era kontemporer juga semakin mengedepankan isu **kesetaraan gender** dan pemberdayaan perempuan. Banyak lembaga pendidikan Islam yang kini membuka akses pendidikan tinggi bagi perempuan, bahkan mendukung keterlibatan mereka dalam berbagai bidang akademik dan profesional. Inisiatif ini menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat Muslim yang adil dan setara.

BAB 3

LANDASAN HUKUM DAN REGULASI PENDIDIKAN ISLAM

Pendidikan Islam memiliki dasar hukum yang kuat baik dalam perspektif agama maupun dalam kerangka hukum positif di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia. Landasan hukum ini memberikan legitimasi terhadap pelaksanaan pendidikan Islam sekaligus mengatur tata kelola, kurikulum, dan tujuan pendidikan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan masyarakat.

Dalam perspektif agama, landasan hukum pendidikan Islam bersumber dari **Al-Qur'an**, **Hadits**, serta hasil ijtihad ulama yang mengatur pentingnya pendidikan sebagai kewajiban individu dan sosial. Al-Qur'an memuat berbagai ayat yang menegaskan pentingnya pendidikan, seperti firman Allah dalam Surah Al-'Alaq (96:1-5) yang memerintahkan untuk membaca sebagai bentuk awal proses pembelajaran. Hadits Nabi Muhammad SAW juga menegaskan pentingnya pendidikan, salah satunya dalam sabdanya, *"Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim, laki-laki maupun perempuan"* (HR. Ibnu Majah).

Selain landasan agama, pendidikan Islam juga memiliki dasar hukum dalam kerangka hukum nasional di berbagai negara. Di Indonesia, pendidikan Islam diatur secara eksplisit dalam beberapa regulasi penting. **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** menjadi landasan utama yang mengakui hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Pasal 31 ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah berupaya menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.

Landasan hukum spesifik tentang pendidikan Islam tercantum dalam **Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)**. Dalam undang-undang

ini, pendidikan Islam diakui sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Pasal 30 menyebutkan bahwa pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama serta menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan Islam dalam konteks ini diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal seperti madrasah, perguruan tinggi keagamaan Islam, maupun jalur non-formal seperti pesantren.

Selain UU Sisdiknas, **Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren** memberikan pengakuan dan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional. UU ini mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan pesantren, kurikulum, pendanaan, serta peran pesantren dalam membentuk karakter santri dan kontribusi terhadap pembangunan nasional.

Regulasi lebih lanjut diatur dalam **Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan**, yang mengatur pelaksanaan pendidikan agama di sekolah umum dan lembaga pendidikan keagamaan. PP ini menjabarkan standar kurikulum pendidikan agama, kompetensi pendidik, dan tata kelola lembaga pendidikan keagamaan Islam.

Dalam konteks pendidikan tinggi Islam, **Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2021** tentang Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri mengatur penyelenggaraan universitas Islam negeri di Indonesia, termasuk pengembangan kurikulum integratif antara ilmu agama dan ilmu umum.

Selain regulasi nasional, pendidikan Islam di Indonesia juga mengacu pada prinsip **Bhinneka Tunggal Ika**, yang menekankan pentingnya keberagaman dan toleransi dalam sistem pendidikan. Pendidikan Islam diarahkan tidak hanya untuk memperkuat iman dan takwa

peserta didik, tetapi juga untuk membangun sikap moderat, inklusif, dan toleran terhadap perbedaan.

Landasan hukum dan regulasi pendidikan Islam ini menjadi pijakan penting dalam mengembangkan sistem pendidikan yang tidak hanya berbasis pada ajaran agama tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip pendidikan nasional dan kebutuhan global. Melalui kerangka hukum yang jelas, pendidikan Islam diharapkan dapat terus berkembang, inklusif, dan berkontribusi positif dalam membangun masyarakat yang cerdas, berakhlak mulia, dan berdaya saing tinggi.

A. Al-Qur'an dan Hadis sebagai Dasar Kebijakan

Al-Qur'an dan Hadis merupakan landasan utama dalam penyusunan kebijakan pendidikan Islam. Keduanya tidak hanya menjadi pedoman spiritual bagi umat Muslim tetapi juga menjadi sumber hukum dan prinsip dasar yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan. Kebijakan pendidikan Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis bertujuan untuk membentuk individu yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta memiliki kecakapan intelektual dan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam Al-Qur'an, banyak ayat yang menegaskan pentingnya pendidikan dan pencarian ilmu. Salah satu ayat fundamental yang menjadi dasar kebijakan pendidikan adalah firman Allah dalam Surah Al-'Alaq (96:1-5): *"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya."* Ayat ini menunjukkan bahwa pencarian ilmu merupakan perintah langsung dari Allah dan menjadi bagian penting dalam membentuk karakter manusia.

Selain itu, Surah Az-Zumar (39:9) juga menegaskan keutamaan orang berilmu: "*Katakanlah: 'Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?'*" Ayat ini menegaskan bahwa pendidikan dan pengetahuan memiliki posisi tinggi dalam Islam, dan kebijakan pendidikan harus berorientasi pada peningkatan kualitas intelektual umat.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menjadi rujukan penting dalam menyusun kebijakan pendidikan Islam. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah bersabda: "*Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim, laki-laki maupun perempuan*" (HR. Ibnu Majah). Hadis ini menjadi dasar bahwa pendidikan bersifat inklusif dan merupakan hak serta kewajiban bagi setiap individu tanpa memandang jenis kelamin, status sosial, atau latar belakang ekonomi.

Hadis lainnya yang menjadi pijakan kebijakan pendidikan Islam adalah: "*Sesungguhnya para malaikat membentangkan sayapnya untuk penuntut ilmu karena ridha dengan apa yang ia cari*" (HR. Abu Dawud). Hadis ini menunjukkan tingginya derajat pencari ilmu dalam Islam dan menjadi motivasi dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang mengedepankan penghargaan terhadap ilmu dan proses belajar-mengajar.

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, kebijakan pendidikan Islam dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara aspek spiritual, intelektual, dan sosial. Pendidikan tidak hanya difokuskan pada penguasaan ilmu pengetahuan semata, tetapi juga pada pembentukan akhlak mulia dan karakter Islami. Konsep *tarbiyah* (pendidikan) dalam Islam menekankan pentingnya membina manusia secara utuh agar menjadi insan kamil, yakni manusia yang sempurna dalam iman, ilmu, dan amal.

Selain itu, Al-Qur'an dan Hadis juga menjadi dasar bagi prinsip-prinsip keadilan dan inklusivitas dalam kebijakan pendidikan Islam. Setiap individu berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa diskriminasi. Nilai-nilai seperti kasih sayang, kejujuran, tanggung

jawab, dan keadilan menjadi bagian integral dalam proses pendidikan yang berlandaskan syariat Islam.

Dengan menjadikan Al-Qur'an dan Hadis sebagai dasar kebijakan, sistem pendidikan Islam diharapkan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga kuat dalam iman dan akhlak. Generasi ini diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat dan mampu menghadapi tantangan zaman dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam.

B. Undang-Undang dan Peraturan Pendidikan Islam di Indonesia

Pendidikan Islam di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat yang diatur melalui berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah. Kerangka hukum ini menjadi dasar legalitas dalam penyelenggaraan pendidikan Islam di berbagai jenjang dan jalur pendidikan, baik formal, non-formal, maupun informal. Selain itu, regulasi ini juga mengatur tata kelola, kurikulum, serta tujuan pendidikan Islam agar sejalan dengan nilai-nilai agama dan visi pendidikan nasional.

Landasan hukum tertinggi yang mengatur pendidikan Islam di Indonesia adalah **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**. Dalam Pasal 31 ayat (1) disebutkan bahwa *"Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan."* Sementara itu, ayat (3) menegaskan bahwa *"Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa."* Ketentuan ini menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia, termasuk pendidikan Islam, diarahkan untuk membangun karakter bangsa yang berlandaskan nilai keimanan dan ketakwaan.

Selanjutnya, regulasi yang lebih spesifik diatur dalam **Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)**. UU ini menjadi payung hukum utama

bagi seluruh sistem pendidikan di Indonesia, termasuk pendidikan Islam. Dalam Pasal 30 UU Sisdiknas disebutkan bahwa pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama serta menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan keagamaan Islam diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal seperti madrasah dan perguruan tinggi keagamaan Islam, serta jalur non-formal seperti pesantren dan majelis taklim.

Untuk lembaga pendidikan Islam formal, seperti **madrasah**, pengaturannya dijabarkan lebih lanjut dalam **Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan**. Peraturan ini mengatur penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah umum dan pendidikan keagamaan di lembaga khusus seperti madrasah dan pesantren. Dalam peraturan ini, madrasah diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki kurikulum integratif antara pendidikan agama dan umum, dengan pengawasan langsung dari Kementerian Agama.

Pendidikan pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, mendapatkan pengakuan hukum melalui **Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren**. UU ini memberikan legitimasi yang kuat terhadap pesantren dan mengakui perannya dalam mencetak generasi yang berakhlak mulia dan memiliki kecakapan hidup. UU Pesantren juga mengatur tentang kurikulum berbasis kitab kuning, pengelolaan dana, akreditasi, hingga pengembangan pesantren modern yang memadukan pendidikan agama dan umum.

Di tingkat pendidikan tinggi, pendidikan Islam diatur melalui **Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2021** tentang Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Regulasi ini mengatur tata kelola universitas Islam negeri seperti **UIN (Universitas Islam Negeri)**, **IAIN (Institut Agama Islam Negeri)**, dan **STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam**

Negeri), yang mengintegrasikan pendidikan agama dengan berbagai disiplin ilmu umum seperti sains, teknologi, ekonomi, dan sosial.

Selain itu, beberapa peraturan teknis dari **Kementerian Agama** juga mengatur aspek-aspek spesifik dalam pendidikan Islam. Misalnya, regulasi tentang kurikulum madrasah yang mencakup mata pelajaran agama Islam seperti Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), serta Bahasa Arab. Kementerian Agama juga mengeluarkan peraturan tentang sertifikasi guru madrasah, akreditasi lembaga pendidikan Islam, dan pengembangan kurikulum berbasis integrasi ilmu agama dan ilmu umum.

Sistem pendidikan Islam di Indonesia juga selaras dengan prinsip **Bhinneka Tunggal Ika**, yang menekankan pentingnya toleransi dan keberagaman. Pendidikan Islam diarahkan untuk memperkuat karakter moderat melalui pendekatan **Islam Wasathiyah** (Islam moderat), yang mengajarkan nilai keseimbangan, toleransi, dan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan adanya undang-undang dan regulasi yang komprehensif ini, pendidikan Islam di Indonesia memiliki landasan hukum yang kokoh untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sistem hukum ini juga memastikan bahwa pendidikan Islam dapat berjalan secara profesional, inklusif, dan berkualitas, sejalan dengan cita-cita pendidikan nasional.

C. Peran Kementerian Agama dalam Kebijakan Pendidikan Islam

Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia memegang peran sentral dalam merumuskan, mengelola, dan mengawasi kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Sebagai lembaga pemerintah yang memiliki otoritas di bidang agama, Kemenag bertanggung jawab memastikan pendidikan Islam berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, nilai-nilai moral, serta sejalan dengan tujuan pendidikan nasional. Peran ini mencakup berbagai aspek mulai dari

perumusan kebijakan, pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas pendidik, hingga pengawasan lembaga pendidikan Islam.

Salah satu peran utama Kementerian Agama adalah **merumuskan kebijakan pendidikan Islam** yang mencakup seluruh jenjang dan jalur pendidikan, baik formal, non-formal, maupun informal. Kemenag bertugas menyusun peraturan dan pedoman teknis terkait penyelenggaraan pendidikan di madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi keagamaan Islam. Melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis), Kemenag mengatur standar kurikulum, kompetensi lulusan, serta pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah umum dan lembaga pendidikan Islam.

Dalam pengembangan kurikulum, Kemenag memastikan adanya keseimbangan antara **ilmu agama** dan **ilmu umum** di lembaga pendidikan Islam. Madrasah, sebagai contoh, mengintegrasikan mata pelajaran agama seperti Al-Qur'an Hadis, Fikih, Akidah Akhlak, dan Sejarah Kebudayaan Islam dengan mata pelajaran umum seperti Matematika, Sains, dan Bahasa Indonesia. Kurikulum ini bertujuan menciptakan lulusan yang memiliki pemahaman agama yang kuat sekaligus kompetensi akademik yang mumpuni.

Selain madrasah, Kementerian Agama juga memiliki tanggung jawab dalam mengelola **pendidikan pesantren**. Dengan diberlakukannya **Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren**, Kemenag memiliki peran strategis dalam memajukan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang tidak hanya fokus pada pendidikan agama, tetapi juga memperhatikan aspek keterampilan dan kewirausahaan. Kemenag memberikan bimbingan dan pendampingan kepada pesantren dalam pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas pengajar, serta fasilitasi bantuan dana operasional.

Di tingkat pendidikan tinggi, Kementerian Agama mengelola **Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)** seperti Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama

Islam Negeri (IAIN), dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Kemenag bertanggung jawab dalam pengembangan kurikulum integratif antara ilmu agama dan ilmu umum, peningkatan mutu akademik, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. PTKIN diarahkan untuk menjadi pusat kajian dan pengembangan keilmuan Islam yang relevan dengan tuntutan zaman.

Kemenag juga berperan dalam **peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan** di lembaga pendidikan Islam. Program sertifikasi guru, pelatihan kompetensi, serta beasiswa pendidikan bagi guru dan dosen menjadi bagian dari upaya Kemenag untuk meningkatkan mutu pendidikan. Guru madrasah, ustaz di pesantren, dan dosen di PTKIN mendapatkan pelatihan berkala guna mengasah kemampuan pedagogis dan profesionalisme mereka.

Selain itu, Kementerian Agama berperan aktif dalam **pengawasan dan akreditasi** lembaga pendidikan Islam. Melalui Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Kemenag memastikan bahwa lembaga pendidikan Islam memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Pengawasan ini mencakup aspek kurikulum, manajemen sekolah, kualitas pendidik, dan fasilitas pendidikan.

Dalam menghadapi dinamika globalisasi dan perkembangan teknologi, Kemenag juga mendorong **digitalisasi pendidikan Islam**. Program digitalisasi madrasah dan pesantren, penyediaan platform e-learning, serta pengembangan aplikasi pembelajaran agama menjadi bagian dari kebijakan strategis Kemenag untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan Islam di era digital.

Selain aspek akademik, Kementerian Agama juga mengedepankan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai **Islam moderat** atau *Islam Wasathiyah*. Melalui pendidikan Islam,

Kemenag berupaya membentuk generasi Muslim yang tidak hanya cerdas dan berakhlak mulia tetapi juga memiliki sikap toleran, damai, dan inklusif dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan peran yang luas dan strategis ini, Kementerian Agama menjadi pilar utama dalam mengembangkan pendidikan Islam yang bermutu, relevan, dan adaptif terhadap tantangan zaman. Melalui kebijakan yang komprehensif dan inovatif, Kemenag terus berupaya memastikan pendidikan Islam dapat memberikan kontribusi nyata dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun masyarakat yang berkarakter Islami.

D. Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam di Berbagai Negara

Implementasi kebijakan pendidikan Islam di berbagai negara memiliki karakteristik yang beragam, tergantung pada sistem pemerintahan, budaya, serta dominasi agama di masing-masing wilayah. Meskipun prinsip dasar pendidikan Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, pendekatan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan sosial, politik, dan ekonomi setiap negara. Beberapa negara menerapkan pendidikan Islam sebagai bagian utama dalam sistem pendidikan nasional, sementara negara lain mengintegrasikannya secara parsial dalam kurikulum sekolah atau melalui lembaga pendidikan khusus.

Di **Arab Saudi**, pendidikan Islam memegang peranan sentral dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum pendidikan di semua jenjang menempatkan studi agama sebagai mata pelajaran inti. Al-Qur'an, Hadis, Tauhid, Fikih, dan Sejarah Islam diajarkan secara mendalam di sekolah-sekolah negeri maupun swasta. Pemerintah Saudi juga mendirikan universitas khusus studi Islam, seperti **Universitas Islam Madinah**, yang menjadi pusat pendidikan agama tingkat tinggi dengan mahasiswa dari berbagai negara. Pendidikan agama di Arab Saudi tidak hanya bertujuan membentuk karakter Islami tetapi juga memperkuat identitas nasional berdasarkan prinsip Islam.

Di **Mesir**, sistem pendidikan Islam memiliki sejarah panjang dan terintegrasi dalam struktur pendidikan nasional. **Al-Azhar University** di Kairo, yang berdiri sejak abad ke-10, menjadi pusat pendidikan Islam terkemuka di dunia. Mesir memiliki sistem pendidikan Al-Azhar yang mencakup tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Siswa yang masuk ke lembaga pendidikan Al-Azhar mendapatkan kurikulum berbasis ilmu agama yang dikombinasikan dengan ilmu umum. Pemerintah Mesir mengawasi pendidikan ini melalui Kementerian Pendidikan dan Otoritas Al-Azhar, memastikan keseimbangan antara nilai-nilai keagamaan dan ilmu pengetahuan modern.

Di **Indonesia**, pendidikan Islam diintegrasikan dalam sistem pendidikan nasional melalui madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi keagamaan Islam. Madrasah di Indonesia memiliki kurikulum ganda yang mencakup pendidikan agama Islam dan ilmu umum. Pesantren, sebagai lembaga pendidikan tradisional, masih menjadi pusat pendidikan agama yang kuat, dengan beberapa pesantren modern kini mengadopsi kurikulum formal untuk mempersiapkan santri menghadapi tantangan global. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama mengawasi pelaksanaan pendidikan Islam, memastikan standar pendidikan terpenuhi tanpa mengabaikan nilai-nilai kebangsaan dan pluralisme.

Di **Malaysia**, sistem pendidikan Islam cukup maju dengan adanya integrasi kurikulum agama dan akademik di sekolah negeri maupun swasta. Malaysia memiliki sekolah agama negeri yang disebut **Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA)** dan **Maahad Tahfiz** yang fokus pada hafalan Al-Qur'an. Pendidikan Islam juga diajarkan di sekolah umum sebagai bagian dari kurikulum nasional. Pemerintah Malaysia memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan pendidikan Islam dengan membangun universitas ternama seperti **International Islamic University Malaysia (IIUM)** yang menggabungkan studi Islam dan ilmu pengetahuan modern dalam kurikulumnya.

Sementara itu, di negara-negara barat seperti **Inggris** dan **Amerika Serikat**, pendidikan Islam umumnya dilaksanakan oleh komunitas Muslim melalui sekolah swasta dan madrasah sore. Di Inggris, terdapat sejumlah sekolah Islam swasta yang diakui oleh pemerintah dan mengadopsi kurikulum nasional dengan tambahan studi agama Islam. Pemerintah Inggris mengizinkan pendidikan agama selama memenuhi standar akademik dan prinsip inklusivitas. Di Amerika Serikat, pendidikan Islam lebih banyak berfokus pada kegiatan non-formal, seperti madrasah akhir pekan atau sekolah komunitas Muslim yang mengajarkan Al-Qur'an, bahasa Arab, dan prinsip dasar agama.

Di negara dengan mayoritas non-Muslim seperti **India**, pendidikan Islam dijalankan melalui madrasah tradisional yang tersebar di berbagai wilayah. Pemerintah India memberikan kebebasan kepada komunitas Muslim untuk mengelola pendidikan agama mereka, meskipun terdapat perdebatan tentang modernisasi kurikulum madrasah agar lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Beberapa madrasah telah mengintegrasikan pelajaran umum seperti matematika dan sains untuk memperluas peluang kerja bagi lulusannya.

Dalam konteks global, organisasi internasional seperti **Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)** juga berperan dalam mendorong pengembangan pendidikan Islam di negara-negara anggotanya. OKI mendukung program pertukaran akademik, penelitian, dan pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang moderat dan relevan dengan perkembangan dunia.

BAB 4

KURIKULUM DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM

Kurikulum dalam kebijakan pendidikan Islam merupakan instrumen utama yang berfungsi untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Kurikulum ini dirancang tidak hanya untuk mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk karakter dan akhlak mulia peserta didik berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis. Dalam konteks pendidikan Islam, kurikulum memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu duniawi sehingga menciptakan keseimbangan antara aspek spiritual, intelektual, emosional, dan sosial.

Secara umum, kurikulum pendidikan Islam terdiri atas dua komponen utama, yaitu **kurikulum inti agama** dan **kurikulum umum**. Kurikulum inti agama mencakup materi pembelajaran seperti Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab. Tujuan dari kurikulum ini adalah membekali peserta didik dengan pemahaman mendalam tentang ajaran Islam, mendorong pengamalan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, serta memperkuat identitas keislaman. Kurikulum umum, di sisi lain, meliputi mata pelajaran seperti Matematika, Sains, Bahasa, dan Ilmu Sosial yang bertujuan membangun kompetensi akademik dan keterampilan abad ke-21.

Dalam konteks Indonesia, sistem kurikulum pendidikan Islam diatur oleh **Kementerian Agama** melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Madrasah, sebagai lembaga pendidikan formal Islam, menerapkan **kurikulum ganda** yang mengintegrasikan kurikulum agama dan kurikulum nasional. Model ini memungkinkan peserta didik mendapatkan pemahaman agama yang kuat sekaligus menguasai ilmu pengetahuan modern. Kurikulum madrasah terdiri dari

mata pelajaran wajib agama Islam dan mata pelajaran umum, dengan proporsi yang diatur sesuai jenjang pendidikan.

Di lembaga pendidikan non-formal seperti **pesantren**, kurikulum cenderung lebih fleksibel dan berbasis kitab kuning. Pesantren tradisional mengajarkan ilmu-ilmu klasik seperti tafsir, hadis, fiqih, tasawuf, dan ilmu alat (nahwu-sharaf) dengan metode halaqah dan sorogan. Namun, seiring perkembangan zaman, banyak pesantren modern mengadopsi kurikulum formal yang mencakup pelajaran umum guna memperluas wawasan dan meningkatkan peluang karier santri di masa depan.

Pendidikan tinggi Islam seperti **Universitas Islam Negeri (UIN)** dan **Institut Agama Islam Negeri (IAIN)** juga mengembangkan kurikulum yang bersifat integratif. Selain program studi berbasis ilmu agama seperti Hukum Islam, Pendidikan Agama Islam, dan Tafsir Hadis, perguruan tinggi Islam kini menawarkan program studi umum seperti Ekonomi, Teknik, dan Sains yang dikaji dalam perspektif Islam. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan keilmuan luas namun tetap berlandaskan nilai-nilai keislaman.

Selain aspek konten, kurikulum pendidikan Islam juga menekankan pada **metode pembelajaran** yang holistik dan humanis. Metode seperti ceramah, diskusi, tanya jawab, dan praktik ibadah diterapkan untuk membangun pemahaman yang mendalam dan keterampilan aplikatif. Pendidikan Islam juga mengintegrasikan pendekatan **tarbiyah ruhiyah** (pendidikan spiritual) melalui pembiasaan ibadah harian, seperti shalat berjamaah, membaca Al-Qur'an, dan kegiatan keagamaan lainnya yang bertujuan membentuk karakter religius peserta didik.

Di era digital saat ini, pengembangan kurikulum pendidikan Islam juga diarahkan pada pemanfaatan **teknologi informasi**. E-learning, aplikasi pembelajaran Al-Qur'an, serta platform diskusi daring menjadi bagian dari upaya modernisasi kurikulum tanpa

menghilangkan esensi ajaran Islam. Inovasi ini memudahkan peserta didik untuk mengakses materi pembelajaran secara fleksibel dan interaktif.

Selain itu, kurikulum pendidikan Islam berfokus pada **pembentukan karakter** melalui pendidikan akhlak. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan disiplin diajarkan secara eksplisit dalam mata pelajaran maupun secara implisit melalui pembiasaan di lingkungan sekolah. Dengan pendekatan ini, pendidikan Islam diharapkan dapat melahirkan generasi Muslim yang tidak hanya cerdas intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral dan kepedulian sosial yang tinggi.

A. Konsep Kurikulum Pendidikan Islam

Kurikulum pendidikan Islam merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, materi pelajaran, serta metode yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Kurikulum ini dirancang untuk membentuk peserta didik menjadi insan kamil, yaitu individu yang seimbang antara aspek spiritual, intelektual, emosional, dan sosial. Dalam konsepnya, kurikulum pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada pengembangan kemampuan kognitif, tetapi juga mengintegrasikan aspek afektif dan psikomotorik, sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki kecerdasan intelektual sekaligus akhlak mulia.

Dasar utama dari kurikulum pendidikan Islam adalah **Al-Qur'an dan Hadis** yang menjadi pedoman dalam menentukan tujuan, isi, dan metode pembelajaran. Selain itu, konsep kurikulum pendidikan Islam juga memperhatikan ijtihad ulama dan kebutuhan masyarakat, sehingga kurikulum ini mampu berkembang sesuai dengan tuntutan zaman tanpa kehilangan esensi nilai-nilai Islam. Pendidikan Islam mengedepankan integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum, sehingga peserta didik tidak hanya memahami ajaran Islam secara mendalam

tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan menjawab tantangan global.

Salah satu karakteristik penting dalam konsep kurikulum pendidikan Islam adalah pendekatan **holistik** yang mencakup dimensi duniawi dan ukhrawi. Kurikulum ini tidak membedakan secara tegas antara ilmu agama dan ilmu duniawi, melainkan memandang seluruh ilmu sebagai bagian dari pengetahuan yang bersumber dari Allah SWT. Oleh karena itu, pendidikan Islam mendorong peserta didik untuk mengembangkan potensi diri secara menyeluruh, baik dalam aspek keagamaan, sosial, intelektual, maupun keterampilan hidup (life skills).

Selain itu, kurikulum pendidikan Islam mengutamakan pendekatan berbasis **nilai dan akhlak**. Konsep ini bertujuan membentuk karakter peserta didik agar memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan akhlak tidak hanya diajarkan secara teoritis, tetapi juga dipraktikkan melalui pembiasaan ibadah, kegiatan sosial, dan interaksi yang mencerminkan nilai-nilai Islami seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kasih sayang.

Konsep kurikulum pendidikan Islam juga memperhatikan **kontekstualisasi** dalam pengembangan materi dan metode pembelajaran. Kurikulum disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat di mana pendidikan tersebut dilaksanakan. Hal ini memungkinkan kurikulum pendidikan Islam untuk tetap relevan dan aplikatif dalam berbagai konteks kehidupan. Misalnya, di wilayah tertentu, kurikulum dapat memasukkan materi lokal yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, seperti kearifan lokal dalam menjaga lingkungan atau tradisi sosial yang Islami.

Selanjutnya, kurikulum pendidikan Islam mengedepankan prinsip **keseimbangan** antara teori dan praktik. Peserta didik tidak hanya diajarkan konsep-konsep agama secara teoritis

tetapi juga diarahkan untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata. Kegiatan seperti praktik ibadah, kerja sosial, serta proyek kolaboratif menjadi bagian dari strategi pembelajaran yang memperkuat pemahaman sekaligus keterampilan peserta didik.

Dalam perkembangannya, konsep kurikulum pendidikan Islam juga mengintegrasikan unsur **teknologi dan inovasi** sebagai respons terhadap dinamika zaman. Pemanfaatan media digital, e-learning, dan aplikasi pendidikan berbasis Islam menjadi sarana yang efektif untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Kurikulum ini juga mendorong peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif dalam menghadapi tantangan global.

B. Kurikulum Madrasah dan Pesantren

Kurikulum madrasah dan pesantren merupakan dua model pendidikan Islam yang memiliki kekhasan dalam pendekatan dan struktur pembelajarannya. Keduanya berperan penting dalam membentuk generasi Muslim yang tidak hanya menguasai ilmu agama tetapi juga memiliki keterampilan untuk menghadapi tantangan zaman. Meskipun memiliki tujuan yang sama dalam menanamkan nilai-nilai Islam, kurikulum madrasah dan pesantren memiliki perbedaan dalam sistem, metode, dan konten pembelajarannya.

Madrasah merupakan lembaga pendidikan formal di bawah pengawasan Kementerian Agama yang mengintegrasikan kurikulum agama dan kurikulum umum. Kurikulum madrasah mengadopsi model **kurikulum ganda**, di mana peserta didik mendapatkan pelajaran agama Islam seperti Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab, sekaligus mempelajari mata pelajaran umum seperti Matematika, Sains, Bahasa Indonesia, dan Ilmu Sosial. Model ini bertujuan membentuk peserta didik yang cerdas secara intelektual, religius, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.

Madrasah terbagi menjadi beberapa jenjang, yaitu **Madrasah Ibtidaiyah (MI)** setara SD, **Madrasah Tsanawiyah (MTs)** setara SMP, dan **Madrasah Aliyah (MA)** setara SMA. Di tingkat Madrasah Aliyah, terdapat program peminatan seperti Ilmu Keagamaan, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Bahasa. Hal ini memberikan keleluasaan bagi peserta didik untuk mengembangkan minat dan bakat sesuai dengan tujuan akademiknya. Kurikulum madrasah juga mengintegrasikan pendidikan karakter melalui penguatan nilai-nilai keislaman dan kegiatan ekstrakurikuler seperti Tahfiz Al-Qur'an, pramuka, dan seni Islami.

Sementara itu, **pesantren** merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional yang lebih menitikberatkan pada pengajaran ilmu agama secara mendalam. Kurikulum pesantren berfokus pada pembelajaran **kitab kuning** (kutub al-turats) yang mencakup berbagai disiplin ilmu seperti tafsir, hadis, fiqh, akidah, tasawuf, nahwu, dan sharaf. Metode pembelajaran di pesantren bersifat klasik, seperti **sorogan** (membaca kitab bersama guru), **bandongan** (pengajian klasikal), dan **halaqah** (diskusi kelompok). Sistem ini memungkinkan terjadinya interaksi intens antara santri dan kiai, yang menjadi pusat otoritas keilmuan dan spiritual di pesantren.

Namun, seiring perkembangan zaman, banyak pesantren yang mulai mengadopsi **kurikulum modern** dengan mengintegrasikan pelajaran umum seperti Matematika, Sains, dan Bahasa Inggris. Model pesantren ini dikenal sebagai **pesantren modern** yang bertujuan menciptakan lulusan yang memiliki pemahaman agama yang kuat sekaligus memiliki keterampilan akademik yang relevan dengan kebutuhan zaman. Pesantren modern juga sering menerapkan sistem kelas, ujian, dan kurikulum yang setara dengan sekolah formal, sambil tetap menjaga tradisi pendidikan pesantren.

Selain itu, beberapa pesantren mengembangkan program **Tahfiz Al-Qur'an** yang fokus pada hafalan Al-Qur'an dan pemahaman tafsir. Pesantren tahfiz ini biasanya memiliki

kurikulum khusus yang menggabungkan hafalan Al-Qur'an dengan pelajaran agama lainnya, serta pelajaran umum untuk membekali santri dengan keterampilan akademik.

Baik madrasah maupun pesantren juga mengintegrasikan pendidikan karakter dan pembinaan akhlak mulia melalui pembiasaan ibadah, kedisiplinan, dan kegiatan sosial. Di pesantren, sistem **asrama** memungkinkan santri untuk hidup dalam komunitas Islami yang mendorong mereka mempraktikkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, sementara madrasah juga mengadakan kegiatan keagamaan seperti salat berjamaah, kajian rutin, dan peringatan hari besar Islam.

Dalam menghadapi era digital, baik madrasah maupun pesantren mulai memanfaatkan **teknologi informasi** dalam proses pembelajaran. E-learning, aplikasi pembelajaran agama, dan penggunaan media interaktif menjadi bagian dari upaya modernisasi kurikulum untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam tanpa menghilangkan esensi nilai-nilai tradisional.

C. Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Kurikulum Nasional

Integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum nasional merupakan upaya strategis untuk membangun sistem pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik semata, tetapi juga berperan dalam pembentukan karakter dan moral peserta didik. Konsep ini bertujuan mengharmoniskan ilmu pengetahuan umum dengan ajaran Islam sehingga peserta didik mampu memahami dan mengamalkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Integrasi tersebut menjadi penting dalam menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas intelektual, tetapi juga memiliki akhlak mulia, sikap toleran, dan kesadaran sosial yang tinggi.

Di Indonesia, integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum nasional dilakukan melalui pendekatan **intrakurikuler**, **kokurikuler**, dan **ekstrakurikuler**. Pada pendekatan intrakurikuler, nilai-nilai Islam diintegrasikan ke dalam mata pelajaran umum seperti Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Ilmu Pengetahuan Sosial. Misalnya,

dalam pelajaran Bahasa Indonesia, peserta didik dapat menganalisis teks yang mengandung pesan moral atau kisah Islami, sedangkan dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, konsep keagungan ciptaan Allah dapat dijelaskan melalui fenomena alam. Pendekatan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dan agama bukan dua hal yang terpisah, melainkan saling melengkapi dalam membangun pemahaman yang holistik.

Selain itu, nilai-nilai Islam juga diajarkan melalui mata pelajaran khusus seperti **Pendidikan Agama Islam (PAI)** yang mencakup materi Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab. Mata pelajaran ini menjadi wadah utama untuk membangun pemahaman agama yang kuat dan mengembangkan karakter peserta didik. Melalui pembelajaran PAI, peserta didik diajak untuk tidak hanya memahami teori agama, tetapi juga mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata.

Pendekatan kokurikuler melibatkan kegiatan penunjang yang mendukung integrasi nilai-nilai Islam, seperti program **Tahfiz Al-Qur'an**, kegiatan keagamaan rutin seperti salat berjamaah, pengajian, dan peringatan hari besar Islam. Program-program ini tidak hanya memperkuat aspek spiritual peserta didik, tetapi juga membentuk keterampilan sosial, seperti kepemimpinan, kerja sama, dan tanggung jawab.

Sementara itu, pendekatan ekstrakurikuler berperan dalam membangun karakter dan keterampilan peserta didik melalui kegiatan di luar jam pelajaran. Kegiatan seperti pramuka berbasis Islam, seni Islami (marawis, nasyid), olahraga, dan kegiatan sosial (bakti sosial, donasi) menjadi sarana efektif dalam menanamkan nilai-nilai Islam seperti solidaritas, kepedulian, dan kejujuran.

Selain metode pembelajaran, integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum nasional juga tercermin dalam proses **penilaian pendidikan**. Aspek penilaian tidak hanya berfokus pada kognitif, tetapi juga mencakup penilaian afektif dan psikomotorik. Hal ini memungkinkan

pendidik untuk mengevaluasi perkembangan sikap, perilaku, dan keterampilan peserta didik secara menyeluruh. Misalnya, peserta didik dinilai tidak hanya dari hasil ulangan dan tugas tertulis, tetapi juga dari aspek kejujuran, kedisiplinan, kerja sama, dan tanggung jawab dalam berbagai aktivitas.

Dalam konteks kebijakan pendidikan, integrasi nilai-nilai Islam di Indonesia mendapat dukungan melalui Undang-Undang **Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) No. 20 Tahun 2003**, yang mengamanatkan pendidikan nasional untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Selain itu, **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan** serta kebijakan dari **Kementerian Agama** turut mendorong penerapan nilai-nilai agama dalam kurikulum sekolah.

Seiring perkembangan teknologi dan informasi, integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum nasional juga memanfaatkan media digital. Aplikasi pembelajaran berbasis Islami, platform e-learning, dan konten edukatif menjadi bagian dari upaya modernisasi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan generasi digital. Dengan pendekatan ini, peserta didik dapat mengakses materi pembelajaran yang mengandung nilai-nilai Islam secara fleksibel dan interaktif.

D. Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam

Evaluasi dan pengembangan kurikulum pendidikan Islam merupakan proses penting dalam memastikan bahwa sistem pendidikan Islam tetap relevan, efektif, dan mampu menjawab tantangan zaman. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana kurikulum yang diterapkan telah mencapai tujuan pendidikan Islam, baik dalam aspek akademik maupun pembentukan karakter peserta didik. Sementara itu, pengembangan kurikulum bertujuan untuk menyesuaikan materi, metode, dan pendekatan pembelajaran dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan masyarakat.

Evaluasi kurikulum dalam pendidikan Islam mencakup berbagai aspek, mulai dari **evaluasi isi kurikulum**, metode pembelajaran, kualifikasi pendidik, hingga pencapaian peserta didik. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti uji kompetensi, observasi proses pembelajaran, wawancara dengan pendidik dan peserta didik, serta analisis hasil akademik dan karakter peserta didik. Evaluasi juga melibatkan pemantauan terhadap efektivitas program pembelajaran berbasis agama dalam membentuk sikap, keterampilan, dan pemahaman peserta didik terhadap nilai-nilai Islam.

Salah satu tantangan dalam evaluasi kurikulum pendidikan Islam adalah bagaimana menyeimbangkan antara **pendidikan agama dan ilmu pengetahuan umum**. Kurikulum harus mampu menciptakan lulusan yang tidak hanya memiliki pemahaman agama yang mendalam, tetapi juga memiliki keterampilan dan wawasan yang relevan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, evaluasi perlu memperhatikan keseimbangan antara pembelajaran kitab-kitab klasik (turats) dengan materi pendidikan modern yang berbasis sains dan teknologi.

Setelah evaluasi dilakukan, langkah selanjutnya adalah **pengembangan kurikulum**, yang mencakup penyempurnaan materi ajar, inovasi metode pembelajaran, serta integrasi teknologi dalam pendidikan Islam. Pengembangan kurikulum dilakukan berdasarkan berbagai pertimbangan, termasuk perkembangan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi yang mempengaruhi dunia pendidikan.

Beberapa strategi pengembangan kurikulum pendidikan Islam meliputi:

1. **Integrasi Teknologi dalam Pembelajaran**

Dengan perkembangan era digital, pendidikan Islam perlu mengadopsi teknologi sebagai bagian dari strategi pembelajaran. Pemanfaatan **e-learning, aplikasi pendidikan Islam, dan media interaktif** dapat meningkatkan efektivitas penyampaian materi serta mempermudah akses terhadap sumber belajar bagi peserta didik.

2. **Peningkatan Kompetensi Guru**

Guru memiliki peran utama dalam implementasi kurikulum pendidikan Islam. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum harus disertai dengan peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan workshop. Guru harus mampu mengajar dengan metode yang inovatif, serta memiliki pemahaman yang mendalam tentang integrasi ilmu agama dan ilmu modern.

3. **Penyusunan Kurikulum Berbasis Kompetensi**

Kurikulum pendidikan Islam harus disusun berdasarkan **pendekatan berbasis kompetensi**, yang tidak hanya menitikberatkan pada hafalan dan teori, tetapi juga pada **penerapan praktis** dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mencakup aspek akademik, keterampilan sosial, dan pengembangan karakter Islami.

4. **Penguatan Pendidikan Karakter dan Akhlak**

Pengembangan kurikulum harus tetap mempertahankan fokus utama pendidikan Islam, yaitu pembentukan karakter dan akhlak mulia. Oleh karena itu, kurikulum perlu menekankan aspek **pembiasaan ibadah, adab, serta pengamalan nilai-nilai Islam** dalam kehidupan sehari-hari.

5. **Kontekstualisasi Kurikulum dengan Kebutuhan Masyarakat**

Kurikulum pendidikan Islam perlu dikembangkan sesuai dengan **konteks sosial dan budaya** di mana pendidikan tersebut diterapkan. Misalnya, di daerah dengan karakter ekonomi berbasis maritim, pendidikan Islam dapat memasukkan materi kewirausahaan Islam yang relevan dengan kondisi masyarakat setempat.

6. Kolaborasi dengan Lembaga Pendidikan Internasional

Untuk meningkatkan daya saing pendidikan Islam di tingkat global, pengembangan kurikulum dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan lembaga pendidikan Islam internasional. Hal ini dapat memperkaya wawasan peserta didik, memperkuat jejaring akademik, serta meningkatkan kualitas pendidikan Islam di tingkat nasional dan global.

BAB 5

LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAN KEBIJAKANNYA

Lembaga pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membentuk generasi Muslim yang unggul dalam aspek spiritual, intelektual, dan sosial. Di Indonesia, sistem pendidikan Islam berkembang melalui berbagai lembaga yang memiliki karakteristik dan kebijakan masing-masing dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan berbasis nilai-nilai Islam. Lembaga-lembaga ini tidak hanya menjadi pusat pembelajaran agama, tetapi juga turut berkontribusi dalam mencetak sumber daya manusia yang kompeten dan berakhlak mulia.

Secara umum, lembaga pendidikan Islam di Indonesia terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu **pendidikan formal** dan **pendidikan non-formal**. Pendidikan formal meliputi **madrasah, sekolah Islam terpadu, dan perguruan tinggi Islam**, sedangkan pendidikan non-formal mencakup **pesantren, majelis taklim**, dan berbagai program pendidikan berbasis masyarakat.

Madrasah merupakan lembaga pendidikan formal yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Madrasah mengintegrasikan kurikulum umum dengan kurikulum agama, yang mencakup mata pelajaran seperti Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam. Madrasah terbagi menjadi beberapa jenjang, yaitu **Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA)**. Kebijakan pengelolaan madrasah mengacu pada standar nasional pendidikan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjamin kualitas pendidikan yang diberikan.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam non-formal yang memiliki sistem pendidikan khas berbasis asrama. Pesantren berfokus pada pengajaran ilmu agama melalui pembelajaran kitab kuning dan pembinaan karakter santri. Pesantren memiliki kebijakan yang

fleksibel dalam kurikulum, dengan beberapa di antaranya mengadopsi kurikulum pendidikan umum untuk memperluas wawasan santri. Pesantren juga berkembang menjadi pesantren modern, yang mengintegrasikan pendidikan agama dan umum serta memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran.

Perguruan tinggi Islam seperti **Universitas Islam Negeri (UIN)**, **Institut Agama Islam Negeri (IAIN)**, dan **Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)** berperan dalam pengembangan keilmuan Islam di tingkat pendidikan tinggi. Lembaga ini menawarkan berbagai program studi yang mencakup ilmu agama dan ilmu umum, seperti pendidikan Islam, ekonomi syariah, hukum Islam, dan sains. Kebijakan perguruan tinggi Islam berfokus pada pengembangan riset, pengabdian masyarakat, dan penguatan kompetensi lulusan agar mampu bersaing di tingkat global.

Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia diatur melalui berbagai regulasi, seperti **Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) No. 20 Tahun 2003**, serta peraturan dari **Kementerian Agama** yang mengatur standar kurikulum, akreditasi, dan kualitas lembaga pendidikan Islam. Pemerintah juga mendukung pengembangan lembaga pendidikan Islam melalui program **Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**, pelatihan guru, dan akreditasi lembaga untuk memastikan kualitas pendidikan yang optimal.

Selain itu, lembaga pendidikan Islam juga mengembangkan kebijakan berbasis nilai-nilai Islam dalam membangun karakter peserta didik. Melalui kegiatan keagamaan seperti salat berjamaah, kajian rutin, dan pembiasaan akhlak mulia, lembaga pendidikan Islam berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan spiritual dan intelektual peserta didik.

A. Madrasah Struktur dan Kebijakan

Madrasah merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam formal di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan pendidikan agama dan umum. Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, madrasah beroperasi di bawah naungan **Kementerian Agama (Kemenag)** dan mengacu pada regulasi pendidikan yang berlaku di Indonesia, khususnya **Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) No. 20 Tahun 2003**. Madrasah tidak hanya berfungsi sebagai pusat pembelajaran ilmu agama Islam, tetapi juga menyediakan pendidikan umum untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan global dengan tetap menjaga nilai-nilai Islam.

Struktur madrasah di Indonesia dibagi berdasarkan jenjang pendidikan, yang meliputi:

1. **Madrasah Ibtidaiyah (MI)** – setara dengan Sekolah Dasar (SD) untuk jenjang pendidikan dasar (kelas 1–6).
2. **Madrasah Tsanawiyah (MTs)** – setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk jenjang pendidikan menengah pertama (kelas 7–9).
3. **Madrasah Aliyah (MA)** – setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk jenjang pendidikan menengah atas (kelas 10–12).
4. **Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)** – mirip dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang fokus pada pendidikan kejuruan berbasis Islam.

Struktur kurikulum di madrasah mengintegrasikan antara **kurikulum nasional** dan **kurikulum keagamaan Islam**. Mata pelajaran umum seperti Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris diajarkan berdampingan dengan mata pelajaran agama seperti **Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab**. Integrasi ini bertujuan untuk

menciptakan peserta didik yang tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan umum, tetapi juga memiliki pemahaman agama yang kuat.

Dari segi kebijakan, madrasah mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Agama melalui berbagai regulasi dan peraturan teknis, termasuk dalam hal kurikulum, sistem evaluasi, akreditasi, dan manajemen lembaga. Salah satu kebijakan penting adalah penerapan **Kurikulum 2013** yang telah disesuaikan untuk madrasah dengan penambahan muatan lokal dan materi agama. Selain itu, madrasah juga mengimplementasikan **pendidikan karakter** berbasis Islam untuk memperkuat aspek moral dan spiritual peserta didik.

Dalam hal pendanaan, madrasah menerima dukungan dari pemerintah melalui program **Bantuan Operasional Sekolah (BOS)** yang membantu pembiayaan operasional lembaga. Selain itu, madrasah swasta sering mendapatkan pendanaan dari yayasan, sumbangan masyarakat, dan sumber dana lain yang sah. Pemerintah juga mendukung peningkatan kualitas madrasah melalui program akreditasi dan pelatihan guru guna memastikan kualitas pendidikan yang setara dengan sekolah umum.

Kebijakan lainnya yang diterapkan di madrasah adalah pengembangan **ekstrakurikuler berbasis Islam** seperti tahfiz Al-Qur'an, seni kaligrafi, marawis, dan kegiatan keagamaan lain yang bertujuan memperkaya pengalaman belajar peserta didik. Selain itu, madrasah juga mendorong integrasi teknologi dalam pembelajaran melalui program **Madrasah Digital**, yang memungkinkan penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi untuk meningkatkan efektivitas pendidikan.

Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi, madrasah di Indonesia terus mengembangkan kebijakan yang adaptif dan inovatif agar dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan berkarakter. Madrasah menjadi bukti nyata bahwa pendidikan

berbasis Islam dapat berjalan seiring dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi nilai-nilai keagamaan.

B. Pesantren Model Pendidikan dan Kebijakannya

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang memiliki peran signifikan dalam membentuk generasi Muslim yang berakhlak mulia dan memiliki pemahaman agama yang kuat. Sebagai lembaga pendidikan berbasis komunitas dan tradisi, pesantren memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari lembaga pendidikan formal lainnya. Sistem pendidikan pesantren mengintegrasikan aspek pembelajaran agama, pembinaan karakter, dan keterampilan hidup dalam satu kesatuan yang harmonis.

Secara umum, pesantren mengadopsi sistem pendidikan berbasis **asrama (boarding school)**, di mana santri tinggal bersama di lingkungan pesantren di bawah bimbingan seorang **kiai** atau ulama sebagai figur sentral dalam proses pendidikan. Model pendidikan ini menekankan kedekatan antara guru dan murid, yang memungkinkan proses transfer ilmu dan nilai moral berlangsung secara intensif dan holistik.

Model pendidikan di pesantren dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan sistem pengajaran dan kurikulum yang diterapkan, yaitu:

1. Pesantren Salafiyah

Pesantren jenis ini mempertahankan sistem pendidikan tradisional dengan fokus utama pada pengajaran **kitab kuning** (literatur klasik Islam) yang meliputi ilmu fiqih, tafsir, hadis, tasawuf, dan gramatika Arab (nahwu dan sharaf). Model pendidikan ini lebih mengedepankan metode **sorogan**, **bandongan**, dan **halaqah** yang bersifat tatap muka langsung antara santri dan kiai. Pesantren salafiyah biasanya tidak mengintegrasikan kurikulum pendidikan umum dalam sistemnya.

2. **Pesantren Khalafiyah**

Pesantren khalafiyah merupakan bentuk pesantren modern yang mengintegrasikan pendidikan agama dengan **kurikulum pendidikan nasional**. Santri di pesantren ini tidak hanya mempelajari ilmu agama, tetapi juga mengikuti pendidikan formal seperti yang diajarkan di sekolah umum, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Pesantren khalafiyah biasanya memiliki unit madrasah atau sekolah di dalamnya, sehingga santri mendapatkan ijazah yang diakui oleh pemerintah.

3. **Pesantren Kombinasi**

Pesantren jenis ini menggabungkan unsur pendidikan salafiyah dan khalafiyah. Selain mempelajari kitab kuning, santri juga mengikuti pendidikan formal dengan kurikulum nasional. Pesantren kombinasi bertujuan menciptakan lulusan yang memiliki pemahaman agama yang mendalam sekaligus menguasai ilmu pengetahuan umum.

Dari segi **kebijakan**, pesantren di Indonesia diatur melalui **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren**, yang memberikan landasan hukum bagi eksistensi dan pengelolaan pesantren sebagai lembaga pendidikan formal, non-formal, dan informal. Undang-undang ini mengakui pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki otonomi dalam pengelolaan kurikulum, metode pembelajaran, dan pengembangan karakter santri.

Beberapa kebijakan penting dalam pengelolaan pesantren antara lain:

1. **Kurikulum Berbasis Keagamaan dan Keterampilan**

Pesantren memiliki fleksibilitas dalam menyusun kurikulum sesuai visi dan misi lembaga. Kurikulum pesantren umumnya mencakup pendidikan agama, pengembangan karakter, dan keterampilan hidup (life skills) seperti kewirausahaan,

pertanian, dan teknologi. Beberapa pesantren juga menawarkan program tahfiz Al-Qur'an, pendidikan bahasa asing (Arab dan Inggris), serta pelatihan keterampilan praktis untuk membekali santri dengan kemampuan yang relevan di masyarakat.

2. Pendidikan Karakter dan Spiritual

Pesantren menempatkan pembentukan karakter dan penguatan spiritualitas sebagai inti dari sistem pendidikan. Melalui pembiasaan ibadah seperti salat berjamaah, zikir, puasa sunah, dan kegiatan sosial, santri dibentuk menjadi individu yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, kerja keras, dan kepedulian sosial menjadi bagian integral dalam pendidikan pesantren.

3. Kemandirian Pesantren dalam Pengelolaan

Berdasarkan regulasi yang berlaku, pesantren memiliki otonomi dalam mengatur sistem manajemen, kurikulum, dan program pengembangan santri. Kemandirian ini memungkinkan pesantren untuk tetap menjaga tradisi pendidikan Islam sambil beradaptasi dengan perkembangan zaman.

4. Dukungan Pemerintah dan Masyarakat

Pemerintah mendukung pesantren melalui program bantuan seperti **Bantuan Operasional Pesantren (BOP)**, pelatihan tenaga pendidik, dan program peningkatan kualitas infrastruktur. Selain itu, pesantren juga mendapatkan dukungan dari masyarakat melalui wakaf, zakat, dan donasi yang digunakan untuk mendanai operasional pesantren.

5. Pengembangan Pesantren Berbasis Kewirausahaan

Untuk meningkatkan kemandirian ekonomi, banyak pesantren mengembangkan unit usaha yang dikelola oleh santri dan pengelola pesantren. Program ini bertujuan untuk

melatih santri memiliki keterampilan kewirausahaan serta membantu pesantren dalam memenuhi kebutuhan finansial. Pesantren berbasis wirausaha ini dikenal dengan istilah “Pesantren Entrepreneur.”

C. Perguruan Tinggi Islam dan Standarisasi Pendidikan

Perguruan Tinggi Islam merupakan lembaga pendidikan tinggi yang berperan penting dalam mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis nilai-nilai Islam sekaligus mencetak generasi intelektual Muslim yang kompeten di berbagai bidang. Di Indonesia, perguruan tinggi Islam berada di bawah koordinasi **Kementerian Agama (Kemenag)** dan berperan dalam mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum dalam satu sistem pendidikan yang utuh. Lembaga ini tidak hanya fokus pada pengembangan studi keislaman, tetapi juga menyediakan berbagai program studi umum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Terdapat beberapa jenis perguruan tinggi Islam di Indonesia yang memiliki karakteristik dan fokus pendidikan yang berbeda, di antaranya:

1. **Universitas Islam Negeri (UIN)** – lembaga pendidikan tinggi Islam yang menawarkan program studi keagamaan dan umum dengan sistem pendidikan terpadu.
2. **Institut Agama Islam Negeri (IAIN)** – berfokus pada pengembangan ilmu keislaman di berbagai bidang seperti syariah, tarbiyah, ushuluddin, dakwah, dan ekonomi Islam.
3. **Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)** – perguruan tinggi Islam yang umumnya dikelola oleh swasta dan memiliki program studi yang lebih spesifik di bidang keislaman.
4. **Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS)** – lembaga pendidikan tinggi Islam swasta yang tersebar di seluruh Indonesia, dikelola oleh yayasan atau organisasi Islam.

Standarisasi pendidikan di perguruan tinggi Islam diatur oleh **Kementerian Agama** melalui berbagai kebijakan dan regulasi untuk memastikan mutu dan kualitas pendidikan yang diberikan. Salah satu landasan hukum utama adalah **Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi**, yang mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia, termasuk perguruan tinggi Islam.

Beberapa aspek penting dalam standarisasi pendidikan perguruan tinggi Islam antara lain:

1. **Kurikulum Berbasis Integrasi Keilmuan**

Perguruan tinggi Islam menerapkan kurikulum berbasis integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum. Model ini bertujuan menciptakan lulusan yang memiliki pemahaman agama yang kuat sekaligus kompetensi akademik di bidang sains, sosial, ekonomi, hukum, dan teknologi. Misalnya, program studi **Ekonomi Syariah, Hukum Islam, dan Psikologi Islam** menggabungkan pendekatan akademik modern dengan prinsip-prinsip syariah.

2. **Akreditasi dan Penjaminan Mutu**

Untuk memastikan kualitas pendidikan, perguruan tinggi Islam harus melalui proses **akreditasi** yang dilakukan oleh **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)** dan **LAM-PTKes** untuk program kesehatan. Selain itu, Kementerian Agama juga memiliki sistem **Penjaminan Mutu Internal (PMI)** yang mengawasi standar akademik, kualitas dosen, kurikulum, dan infrastruktur di perguruan tinggi Islam.

3. **Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Kualitas pendidikan tinggi sangat bergantung pada kompetensi tenaga pendidik. Oleh karena itu, perguruan tinggi Islam menerapkan kebijakan peningkatan kualitas dosen

melalui program **beasiswa S2 dan S3**, pelatihan metodologi pengajaran, dan penelitian. Kemenag juga menyediakan program **beasiswa luar negeri** untuk dosen dan mahasiswa dalam rangka meningkatkan kapasitas akademik dan jaringan internasional.

4. **Riset dan Inovasi Ilmiah**

Perguruan tinggi Islam didorong untuk menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan riset yang relevan dengan nilai-nilai Islam. Melalui program riset unggulan seperti **Program Hibah Penelitian**, perguruan tinggi Islam menghasilkan berbagai penelitian di bidang sains, teknologi, ekonomi syariah, pendidikan Islam, dan hukum Islam. Kolaborasi riset antara perguruan tinggi Islam dan lembaga penelitian nasional maupun internasional juga diperkuat untuk meningkatkan kualitas publikasi ilmiah.

5. **Pendidikan Karakter dan Moderasi Beragama**

Sebagai lembaga berbasis nilai Islam, perguruan tinggi Islam memiliki tanggung jawab dalam membangun karakter mahasiswa melalui program pendidikan agama, pembinaan moral, dan kegiatan sosial. Kemenag juga mendorong perguruan tinggi Islam untuk mengintegrasikan konsep **moderasi beragama** dalam kurikulum guna menciptakan lulusan yang toleran, inklusif, dan mampu berperan aktif dalam menjaga harmoni sosial.

6. **Internasionalisasi Perguruan Tinggi Islam**

Dalam menghadapi persaingan global, perguruan tinggi Islam di Indonesia aktif mengembangkan program **internasionalisasi** melalui kerja sama dengan universitas di luar negeri, pertukaran mahasiswa, serta program double degree. Beberapa UIN dan IAIN juga telah membuka program studi berbahasa Inggris dan menerima mahasiswa internasional untuk memperluas jangkauan akademik.

7. Pemanfaatan Teknologi dalam Pendidikan

Perguruan tinggi Islam turut mengadopsi teknologi dalam proses pembelajaran melalui sistem **e-learning**, kuliah daring, dan pengembangan konten digital. Pandemi COVID-19 mempercepat adopsi sistem pembelajaran berbasis teknologi ini, yang kini menjadi bagian dari kebijakan pendidikan jangka panjang di perguruan tinggi Islam.

8. Pengabdian Masyarakat

Sebagai bagian dari **Tri Dharma Perguruan Tinggi**, perguruan tinggi Islam juga aktif dalam program pengabdian masyarakat. Melalui kegiatan seperti pelatihan keterampilan, bimbingan agama, dan program pemberdayaan ekonomi berbasis syariah, perguruan tinggi Islam berperan langsung dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar.

Dengan sistem pendidikan yang terstandarisasi dan berbasis nilai-nilai Islam, perguruan tinggi Islam di Indonesia diharapkan mampu mencetak lulusan yang unggul secara intelektual, spiritual, dan sosial. Mereka diharapkan tidak hanya menjadi akademisi atau profesional yang kompeten, tetapi juga individu yang mampu menjadi agen perubahan di masyarakat sesuai prinsip-prinsip Islam yang moderat dan rahmatan lil alamin.

D. Peran Lembaga Pendidikan Islam dalam Masyarakat

Lembaga pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membentuk individu yang berakhlak mulia, berpengetahuan luas, dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Sejak masa awal Islam hingga era modern, lembaga pendidikan Islam seperti **pesantren**, **madrasah**, dan **perguruan tinggi Islam** telah menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus sarana pembinaan karakter umat. Peran lembaga ini tidak hanya terbatas pada aspek akademik, tetapi juga mencakup pembinaan sosial, ekonomi, budaya, dan spiritual di tengah masyarakat.

1. Pembinaan Akhlak dan Moralitas Masyarakat

Salah satu peran utama lembaga pendidikan Islam adalah membentuk insan yang memiliki akhlak mulia berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis. Melalui pendidikan berbasis karakter, lembaga pendidikan Islam membekali peserta didik dengan pemahaman agama yang benar, sehingga mereka dapat menerapkan prinsip-prinsip etika Islam dalam kehidupan sehari-hari. Program pembiasaan ibadah, pendidikan akhlak, dan pembinaan moral di lembaga-lembaga ini menjadi fondasi kuat dalam membangun masyarakat yang bermartabat dan harmonis.

2. Penyebaran Ilmu Pengetahuan dan Nilai-Nilai Islam

Lembaga pendidikan Islam berperan sebagai pusat penyebaran ilmu pengetahuan, baik keagamaan maupun umum. Pesantren dan madrasah mengajarkan berbagai disiplin ilmu agama seperti tafsir, hadis, fiqh, dan tasawuf, sementara perguruan tinggi Islam mengembangkan keilmuan yang lebih luas, termasuk sains, teknologi, ekonomi syariah, dan hukum Islam. Melalui integrasi ilmu agama dan ilmu umum, lembaga pendidikan Islam menciptakan generasi yang cerdas secara intelektual dan spiritual.

3. Penguatan Identitas dan Budaya Islam

Lembaga pendidikan Islam juga menjadi benteng dalam menjaga dan melestarikan budaya Islam di tengah masyarakat. Tradisi keagamaan seperti peringatan Maulid Nabi, tadarus Al-Qur'an, pengajian umum, dan kegiatan sosial berbasis nilai Islam rutin dilaksanakan di berbagai lembaga pendidikan Islam. Hal ini memperkuat identitas keislaman masyarakat sekaligus menjadi media dakwah yang efektif.

4. Peran Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Banyak lembaga pendidikan Islam yang aktif dalam program pemberdayaan masyarakat, terutama di bidang sosial dan ekonomi. Pesantren, misalnya, tidak hanya mendidik santri tetapi juga mengembangkan program keterampilan kerja seperti pertanian, peternakan, dan kewirausahaan yang melibatkan masyarakat sekitar. Program **Pesantren Wirausaha** menjadi contoh konkret peran pesantren dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, lembaga pendidikan Islam juga berperan dalam penanggulangan masalah sosial seperti kemiskinan dan kebodohan melalui program **pendidikan inklusif** yang memberikan akses belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program **beasiswa pendidikan, kelas non-formal, dan pelatihan keterampilan** menjadi upaya konkret lembaga pendidikan Islam dalam mengentaskan masalah sosial.

5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Lembaga pendidikan Islam turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas SDM yang kompeten dan berdaya saing tinggi. Dengan kurikulum yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum, peserta didik tidak hanya dibekali dengan pemahaman spiritual yang kuat tetapi juga keterampilan akademik dan profesional yang relevan. Perguruan tinggi Islam, misalnya, telah menghasilkan lulusan di berbagai bidang strategis seperti ekonomi syariah, hukum Islam, pendidikan, dan teknologi yang mampu bersaing di pasar kerja global.

6. Penguatan Moderasi Beragama dan Toleransi Sosial

Di tengah tantangan globalisasi dan isu radikalisme, lembaga pendidikan Islam memiliki tanggung jawab besar dalam membangun pemahaman keagamaan yang moderat dan inklusif. Konsep **moderasi beragama** menjadi salah satu fokus utama

dalam kurikulum pendidikan Islam untuk menciptakan generasi yang toleran, menghargai perbedaan, dan mampu hidup berdampingan secara harmonis di tengah masyarakat yang pluralistik.

Program-program seperti dialog antaragama, pelatihan deradikalisasi, dan pendidikan multikultural sering diadakan oleh lembaga pendidikan Islam untuk memperkuat nilai-nilai toleransi dan menjaga persatuan bangsa.

7. Peran Dakwah dan Transformasi Sosial

Lembaga pendidikan Islam juga berfungsi sebagai agen dakwah yang membawa misi transformasi sosial. Para lulusan lembaga pendidikan Islam sering menjadi tokoh masyarakat yang berperan aktif dalam membimbing umat, baik sebagai ustaz, dai, akademisi, maupun pemimpin komunitas. Melalui pendekatan dakwah yang humanis dan solutif, lembaga pendidikan Islam turut menginspirasi perubahan sosial yang positif di berbagai lapisan masyarakat.

8. Respons Terhadap Isu-isu Kontemporer

Dalam menghadapi tantangan global seperti isu lingkungan, ekonomi digital, dan perubahan sosial, lembaga pendidikan Islam terus melakukan inovasi dan pembaruan kurikulum agar relevan dengan perkembangan zaman. Isu-isu kontemporer seperti **ekonomi syariah digital, fiqh lingkungan, dan etika teknologi** mulai diperkenalkan dalam program studi di perguruan tinggi Islam untuk mempersiapkan lulusan menghadapi dinamika masyarakat modern.

9. Pemberdayaan Perempuan dan Pendidikan Inklusif

Lembaga pendidikan Islam juga berperan dalam memperjuangkan akses pendidikan yang setara bagi semua kalangan, termasuk perempuan dan kelompok marjinal.

Program-program seperti **pendidikan perempuan berbasis pesantren**, pelatihan keterampilan untuk ibu rumah tangga, serta sekolah inklusif bagi anak berkebutuhan khusus menjadi bagian dari upaya membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan sosial.

Melalui berbagai peran tersebut, lembaga pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai pusat pembelajaran tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang aktif membangun masyarakat yang religius, cerdas, mandiri, dan harmonis. Peran strategis ini menjadikan lembaga pendidikan Islam sebagai salah satu pilar penting dalam membangun peradaban Islam yang maju dan berkelanjutan.

BAB 6

PERAN GURU DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM

Guru memiliki posisi sentral dalam sistem pendidikan Islam sebagai pendidik, pembimbing, dan teladan bagi peserta didik. Dalam perspektif Islam, guru tidak hanya bertugas mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga berperan dalam membentuk karakter, akhlak, dan kepribadian peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis. Kebijakan pendidikan Islam memberikan perhatian khusus terhadap peran guru karena mereka merupakan agen utama dalam mengimplementasikan visi dan misi pendidikan Islam di berbagai jenjang pendidikan.

A. Kualifikasi dan Kompetensi Guru dalam Pendidikan Islam

Guru dalam pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki akhlak mulia serta pemahaman keislaman yang kuat. Oleh karena itu, seorang guru harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan ajaran Islam serta perkembangan zaman. Secara kualifikasi, seorang guru dalam pendidikan Islam idealnya memiliki latar belakang akademik yang memadai, minimal berpendidikan sarjana (S1) dalam bidang yang relevan, seperti Pendidikan Agama Islam (PAI) atau ilmu keislaman lainnya. Selain itu, guru juga harus memiliki pemahaman yang mendalam terhadap ajaran Islam, khususnya dalam bidang Al-Qur'an, Hadis, Fiqih, dan Akhlak, sehingga dapat menyampaikan ilmu dengan benar dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Selain aspek akademik, kualifikasi guru dalam pendidikan Islam juga mencakup sertifikasi profesi sebagai bentuk standar kompetensi yang ditetapkan oleh pemerintah. Sertifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa guru memiliki keterampilan pedagogik yang sesuai dengan

kebutuhan peserta didik. Selain itu, guru juga harus menjadi teladan dalam hal akhlak dan kepribadian. Mereka dituntut untuk memiliki karakter yang baik, seperti jujur, sabar, disiplin, dan bertanggung jawab, karena mereka tidak hanya bertugas sebagai pengajar tetapi juga sebagai panutan yang akan mempengaruhi perkembangan karakter peserta didik.

Selain memiliki kualifikasi yang memadai, seorang guru dalam pendidikan Islam juga harus memiliki kompetensi yang mencakup berbagai aspek. Salah satunya adalah kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Guru harus mampu menerapkan metode dan strategi pembelajaran yang efektif dan inovatif agar peserta didik dapat memahami serta mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi lain yang tidak kalah penting adalah kompetensi profesional, di mana seorang guru harus menguasai materi yang diajarkan secara mendalam serta mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, kompetensi sosial juga menjadi aspek yang krusial, karena guru harus mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik dengan peserta didik, orang tua, sesama guru, dan masyarakat guna menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif.

Seiring dengan perkembangan zaman, guru dalam pendidikan Islam juga dituntut untuk memiliki kompetensi dalam pemanfaatan teknologi digital. Penggunaan e-learning, media interaktif, serta platform pembelajaran berbasis digital menjadi bagian dari inovasi yang harus diterapkan dalam proses pembelajaran. Selain itu, dalam konteks keberagaman masyarakat, guru juga memiliki tanggung jawab dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama agar peserta didik dapat memahami Islam secara seimbang dan mampu hidup berdampingan dengan masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda.

Untuk memastikan bahwa guru memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai, berbagai upaya pengembangan dapat dilakukan, seperti pelatihan dan sertifikasi guru, program

pendidikan lanjutan, serta penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Pemerintah dan lembaga pendidikan Islam harus aktif dalam menyediakan berbagai program pengembangan profesional bagi guru, baik dalam bentuk workshop, seminar, maupun studi lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, kolaborasi antara lembaga pendidikan Islam dengan masyarakat dan organisasi keagamaan juga dapat memperkuat peran guru dalam menciptakan sistem pendidikan Islam yang lebih baik.

B. Kebijakan Rekrutmen dan Pengembangan Guru Madrasah

Rekrutmen dan pengembangan guru madrasah merupakan aspek penting dalam kebijakan pendidikan Islam, karena kualitas guru sangat menentukan mutu pembelajaran dan pembentukan karakter peserta didik. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa guru yang mengajar di madrasah memiliki kualifikasi yang memadai, kompetensi yang sesuai, serta komitmen yang kuat dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Dalam rekrutmen guru madrasah, pemerintah dan lembaga pendidikan Islam menerapkan standar tertentu yang harus dipenuhi oleh calon guru, baik dari segi akademik, profesionalisme, maupun pemahaman terhadap nilai-nilai Islam.

Dalam proses rekrutmen, calon guru madrasah diwajibkan memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) dalam bidang yang relevan, seperti Pendidikan Agama Islam (PAI) atau disiplin ilmu lain yang terkait. Selain itu, calon guru juga harus memiliki sertifikasi pendidik sebagai bukti bahwa mereka telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan oleh pemerintah. Proses seleksi guru madrasah biasanya dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk ujian kompetensi, wawancara, serta penilaian terhadap pemahaman mereka tentang ajaran Islam dan metode pengajaran yang sesuai dengan prinsip pendidikan Islam.

Setelah melalui tahap rekrutmen, pengembangan profesional guru madrasah menjadi hal yang tidak kalah penting. Pengembangan ini mencakup berbagai program pelatihan, workshop,

dan pendidikan lanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian guru. Pemerintah, melalui Kementerian Agama dan instansi terkait, sering mengadakan pelatihan berkelanjutan bagi guru madrasah agar mereka dapat mengadopsi metode pengajaran yang lebih efektif dan inovatif. Selain itu, madrasah juga didorong untuk memberikan bimbingan dan pendampingan bagi guru baru agar mereka dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja dan memahami kebijakan pendidikan yang berlaku.

Salah satu aspek penting dalam pengembangan guru madrasah adalah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Di era digital, guru madrasah harus mampu mengintegrasikan teknologi dalam proses belajar-mengajar, seperti menggunakan media pembelajaran berbasis digital, e-learning, serta platform pembelajaran interaktif. Oleh karena itu, pelatihan terkait literasi digital menjadi bagian penting dalam pengembangan kompetensi guru. Selain itu, penguatan nilai-nilai moderasi beragama dalam pendidikan Islam juga menjadi fokus dalam pengembangan guru madrasah, sehingga mereka dapat mendidik peserta didik dengan pemahaman Islam yang inklusif dan toleran.

C. Metode Pengajaran dalam Pendidikan Islam

Metode pengajaran dalam pendidikan Islam memiliki peran penting dalam menyampaikan ilmu pengetahuan serta membentuk karakter dan akhlak peserta didik sesuai dengan ajaran Islam. Metode ini harus sesuai dengan prinsip pendidikan Islam yang menekankan pada pembentukan keimanan, keilmuan, dan akhlak mulia. Oleh karena itu, dalam praktiknya, metode pengajaran dalam pendidikan Islam tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan materi pelajaran tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari peserta didik.

Salah satu metode pengajaran yang sering digunakan dalam pendidikan Islam adalah **metode ceramah**, di mana guru menyampaikan materi secara lisan kepada peserta didik.

Metode ini banyak digunakan dalam pembelajaran di madrasah, pesantren, maupun perguruan tinggi Islam, terutama dalam menyampaikan konsep-konsep keislaman seperti tafsir Al-Qur'an, Hadis, dan Fiqih. Namun, agar tidak monoton, metode ceramah sebaiknya dikombinasikan dengan metode lain yang lebih interaktif.

Selain itu, terdapat metode **diskusi dan tanya jawab**, yang memungkinkan peserta didik untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Metode ini mendorong mereka untuk berpikir kritis dan memahami konsep-konsep Islam secara lebih mendalam. Dalam kajian-kajian keislaman di pesantren dan madrasah, metode ini sering digunakan untuk mengembangkan pemahaman terhadap kitab kuning dan pemecahan masalah-masalah keagamaan yang berkembang di masyarakat.

Metode **demonstrasi dan praktik** juga merupakan bagian penting dalam pendidikan Islam, terutama dalam pembelajaran ibadah, seperti wudhu, salat, dan manasik haji. Dengan metode ini, peserta didik tidak hanya memahami teori tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Guru atau ustaz memberikan contoh secara langsung, kemudian peserta didik menirukan dan mempraktikkannya hingga mencapai pemahaman yang benar.

Selain itu, metode **hafalan (tahfiz)** juga banyak diterapkan dalam pendidikan Islam, khususnya dalam pembelajaran Al-Qur'an. Metode ini bertujuan untuk melatih daya ingat serta menanamkan nilai-nilai keislaman dalam diri peserta didik sejak usia dini. Dalam pembelajaran tahfiz, biasanya digunakan teknik pengulangan (repetisi) agar peserta didik dapat menghafal Al-Qur'an dengan lancar dan benar.

Di era digital, metode pengajaran dalam pendidikan Islam juga semakin berkembang dengan pemanfaatan teknologi. **Metode e-learning dan blended learning** mulai banyak digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan peserta didik yang lebih akrab dengan teknologi.

Penggunaan platform digital seperti video pembelajaran, aplikasi interaktif, dan diskusi daring memungkinkan proses belajar menjadi lebih fleksibel dan menarik.

D. Prospek Karier Guru Pendidikan Islam

Guru pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membangun generasi yang berilmu, berakhlak mulia, dan memiliki pemahaman keislaman yang baik. Seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap pendidikan berbasis nilai-nilai Islam, prospek karier guru pendidikan Islam semakin luas dan menjanjikan. Karier ini tidak hanya terbatas pada pengajaran di sekolah-sekolah formal seperti madrasah dan pesantren, tetapi juga mencakup berbagai bidang lain yang berhubungan dengan pendidikan, dakwah, dan pengembangan masyarakat.

Salah satu jalur utama bagi lulusan pendidikan Islam adalah menjadi **guru atau tenaga pendidik di lembaga formal**, seperti madrasah, sekolah berbasis Islam, dan perguruan tinggi Islam. Di tingkat dasar dan menengah, guru pendidikan Islam mengajar mata pelajaran seperti Pendidikan Agama Islam (PAI), Al-Qur'an Hadis, Fiqih, Akidah Akhlak, dan Sejarah Kebudayaan Islam. Sementara itu, di perguruan tinggi, mereka dapat menjadi dosen dalam berbagai disiplin ilmu keislaman, seperti studi Islam, syariah, atau pendidikan Islam.

Selain itu, prospek karier bagi guru pendidikan Islam juga terbuka di **lembaga pendidikan nonformal**, seperti pesantren, majelis taklim, dan lembaga kursus keislaman. Dalam lingkungan ini, mereka berperan sebagai pendidik yang memberikan pemahaman Islam kepada santri atau masyarakat secara luas. Dengan berkembangnya teknologi, banyak lembaga pendidikan Islam yang kini menggunakan metode pembelajaran daring, sehingga guru juga dapat berkarier sebagai pengajar di platform digital atau membuka kelas online mandiri.

Di luar dunia pendidikan, guru pendidikan Islam juga memiliki peluang untuk bekerja sebagai **penulis, peneliti, dan pengembang kurikulum** di bidang pendidikan Islam. Mereka

dapat menyusun buku ajar, modul pembelajaran, atau meneliti berbagai aspek pendidikan Islam guna meningkatkan efektivitas pembelajaran. Selain itu, mereka juga dapat bekerja di lembaga pemerintahan seperti Kementerian Agama atau organisasi Islam yang berfokus pada kebijakan pendidikan Islam.

Profesi lain yang dapat dijalani oleh lulusan pendidikan Islam adalah **pendakwah, konsultan pendidikan Islam, atau motivator keislaman**. Dengan kemampuan komunikasi dan pemahaman agama yang baik, mereka dapat memberikan ceramah, mengisi kajian keislaman, atau menjadi konsultan pendidikan bagi lembaga-lembaga Islam. Selain itu, mereka juga dapat bekerja di media Islam, seperti menjadi pembicara di radio atau televisi, serta membuat konten edukasi Islam di media sosial.

Seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap pendidikan berbasis Islam, berbagai sekolah Islam terpadu dan lembaga pendidikan berbasis Islam modern terus berkembang. Hal ini membuka kesempatan bagi para guru pendidikan Islam untuk mendapatkan posisi yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan pengembangan keterampilan tambahan seperti penguasaan teknologi pembelajaran, manajemen pendidikan, dan metodologi pengajaran yang inovatif, prospek karier guru pendidikan Islam akan semakin cerah dan berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman.

BAB 7

PEMBIAYAAN DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM

Pembiayaan dalam kebijakan pendidikan Islam merupakan aspek krusial yang menentukan keberlanjutan dan kualitas pendidikan berbasis Islam. Sistem pembiayaan ini mencakup berbagai sumber dana, alokasi anggaran, serta mekanisme distribusi yang digunakan untuk mendukung operasional lembaga pendidikan Islam, baik di tingkat dasar, menengah, maupun perguruan tinggi. Tanpa sistem pembiayaan yang memadai, pengelolaan pendidikan Islam akan menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan fasilitas, rendahnya kesejahteraan tenaga pendidik, serta keterbatasan dalam pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran.

Sumber pembiayaan pendidikan Islam berasal dari berbagai pihak, termasuk **pemerintah, masyarakat, lembaga swasta, dan filantropi Islam**. Pemerintah, melalui Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, mengalokasikan dana untuk madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hibah, serta anggaran khusus dalam APBN dan APBD. Sementara itu, masyarakat berkontribusi melalui pembayaran SPP, infaq, wakaf, dan zakat yang digunakan untuk mendukung operasional lembaga pendidikan Islam, terutama di pesantren dan sekolah berbasis Islam swasta.

Di beberapa negara, termasuk Indonesia, **wakaf dan zakat pendidikan** menjadi salah satu bentuk pembiayaan alternatif yang cukup signifikan. Dana dari wakaf dapat digunakan untuk membangun infrastruktur pendidikan seperti gedung sekolah, perpustakaan, dan laboratorium, sementara zakat dapat dialokasikan untuk beasiswa bagi siswa yang kurang mampu. Lembaga-lembaga zakat dan wakaf telah banyak berperan dalam mendukung pendidikan Islam, baik dalam bentuk bantuan tunai maupun pembangunan sarana pendidikan.

Selain itu, **kerja sama dengan sektor swasta** juga menjadi strategi penting dalam pembiayaan pendidikan Islam. Banyak lembaga pendidikan Islam yang menjalin kemitraan dengan perusahaan atau organisasi yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan, baik melalui Corporate Social Responsibility (CSR) maupun skema sponsor pendidikan. Kerja sama ini membantu madrasah dan perguruan tinggi Islam dalam menyediakan fasilitas yang lebih baik serta program pelatihan bagi tenaga pendidik dan peserta didik.

Tantangan dalam pembiayaan pendidikan Islam masih cukup besar, terutama dalam hal pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Banyak lembaga pendidikan Islam, terutama di daerah terpencil, masih menghadapi keterbatasan dana yang berdampak pada kualitas sarana dan prasarana serta kesejahteraan tenaga pengajarnya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dan sistematis untuk mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan serta memastikan distribusi dana yang lebih merata dan berkeadilan.

A. Sumber Dana Pendidikan Islam

Sumber dana dalam pendidikan Islam berasal dari berbagai pihak yang berkontribusi dalam mendukung keberlanjutan dan peningkatan kualitas pendidikan berbasis Islam. Dana ini sangat penting untuk membiayai berbagai aspek pendidikan, seperti gaji guru, pembangunan infrastruktur, pengadaan sarana dan prasarana, serta pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran. Secara umum, sumber dana pendidikan Islam dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok utama, yaitu dari pemerintah, masyarakat, lembaga filantropi, sektor swasta, dan sumber internasional.

Pemerintah memiliki peran utama dalam mendanai lembaga pendidikan Islam, terutama madrasah dan perguruan tinggi Islam negeri. Dana ini disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola oleh Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Selain itu, pemerintah juga

menyediakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi madrasah dan sekolah Islam, beasiswa pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta berbagai bantuan lainnya untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan Islam.

Selain dana dari pemerintah, sumber pendanaan juga berasal dari partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan, infaq, zakat, dan wakaf pendidikan. Orang tua siswa sering kali berkontribusi melalui pembayaran SPP dan iuran sekolah untuk membantu operasional lembaga pendidikan Islam. Selain itu, banyak individu dan komunitas yang memberikan donasi dalam bentuk infaq dan sedekah guna membantu siswa kurang mampu atau mendukung pengembangan lembaga pendidikan Islam. Wakaf juga menjadi salah satu sumber dana penting, di mana aset wakaf berupa tanah, gedung, atau dana tunai digunakan untuk mendirikan sekolah, pesantren, atau program beasiswa.

Lembaga filantropi dan organisasi Islam juga memainkan peran besar dalam pembiayaan pendidikan Islam. Beberapa organisasi seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan berbagai yayasan pendidikan Islam mengelola dana khusus untuk membangun dan mengembangkan sekolah serta menyediakan beasiswa bagi peserta didik. Selain itu, sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) turut berkontribusi dalam mendukung pendidikan Islam, baik dalam bentuk hibah, pembangunan infrastruktur sekolah, maupun penyediaan pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan.

Di tingkat internasional, terdapat berbagai lembaga donor yang memberikan dukungan bagi pendidikan Islam, baik dalam bentuk hibah, kerja sama riset, maupun program beasiswa bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Bantuan dari lembaga-lembaga filantropi global ini membantu meningkatkan mutu pendidikan Islam dan memperluas akses bagi siswa serta tenaga pendidik di berbagai negara.

B. Peran Pemerintah dalam Pendanaan Pendidikan Islam

Pemerintah memiliki peran penting dalam pendanaan pendidikan Islam sebagai bagian dari tanggung jawabnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan Islam, yang mencakup madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam, memerlukan dukungan finansial yang memadai agar dapat berkembang dan berkontribusi dalam mencetak generasi yang berilmu dan berakhlak. Pendanaan dari pemerintah bertujuan untuk memastikan akses pendidikan yang merata, meningkatkan kualitas pengajaran, serta mendukung keberlanjutan lembaga pendidikan Islam di berbagai daerah.

Salah satu bentuk dukungan pemerintah adalah melalui **alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**. Dana ini dikelola oleh Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk membiayai operasional madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam negeri. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan **Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah**, yang diberikan kepada madrasah negeri dan swasta guna membantu biaya operasional harian, seperti pembayaran gaji guru honorer, pembelian alat tulis, serta pengadaan fasilitas pembelajaran.

Di tingkat pendidikan tinggi, pemerintah mendukung perguruan tinggi Islam melalui **pendanaan bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)**, seperti Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Dukungan ini mencakup subsidi pendidikan, pengembangan riset, serta beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan kurang mampu. Selain itu, pemerintah juga menyediakan **beasiswa pendidikan**, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan bantuan studi lainnya, guna meningkatkan akses pendidikan Islam bagi masyarakat yang kurang mampu.

Selain melalui anggaran negara, pemerintah juga berperan dalam **mendorong optimalisasi dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF)** untuk pendidikan Islam. Lembaga zakat dan wakaf yang berada di bawah pengawasan pemerintah didorong untuk menyalurkan dana yang mereka kelola ke lembaga pendidikan Islam, baik dalam bentuk beasiswa maupun pengembangan sarana dan prasarana.

Dalam konteks regulasi, pemerintah juga berperan dalam **membuat kebijakan yang mendukung pendanaan pendidikan Islam**. Berbagai peraturan dan undang-undang telah diterbitkan untuk memastikan pendidikan Islam mendapatkan dukungan finansial yang layak dan merata. Misalnya, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan Islam memiliki posisi yang sama dengan pendidikan umum, sehingga berhak mendapatkan pendanaan dari negara.

C. Peran Wakaf dan Zakat dalam Pendidikan Islam

Wakaf dan zakat memiliki peran strategis dalam mendukung pendanaan dan pengembangan pendidikan Islam. Sebagai bagian dari ajaran Islam yang menekankan kesejahteraan sosial, wakaf dan zakat dapat menjadi solusi untuk memperkuat akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu serta meningkatkan kualitas lembaga pendidikan Islam. Dengan pengelolaan yang baik, kedua instrumen ini mampu memberikan manfaat jangka panjang dalam membangun sistem pendidikan Islam yang berkelanjutan dan berkualitas.

1. Wakaf dalam Pendidikan Islam

Wakaf adalah pemberian aset yang manfaatnya digunakan untuk kepentingan umum, termasuk pendidikan. Dalam sejarah Islam, wakaf telah banyak digunakan untuk mendirikan lembaga pendidikan, membangun fasilitas sekolah, serta menyediakan dana abadi bagi keberlangsungan pendidikan Islam. Banyak universitas ternama di dunia Islam,

seperti Al-Azhar di Mesir dan Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko, berkembang dengan dukungan sistem wakaf yang kuat.

Di Indonesia, wakaf pendidikan dikelola oleh berbagai lembaga, baik yang berada di bawah naungan organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah maupun lembaga filantropi independen. Aset wakaf dapat berupa tanah, bangunan sekolah, asrama, perpustakaan, laboratorium, maupun dana wakaf tunai yang hasil investasinya digunakan untuk mendukung operasional pendidikan Islam. Keberadaan wakaf pendidikan sangat membantu dalam mengurangi ketergantungan pada pendanaan dari pemerintah dan masyarakat, serta menciptakan sistem pendidikan yang lebih mandiri.

2. Zakat dalam Pendidikan Islam

Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu untuk menyisihkan sebagian hartanya guna membantu mereka yang membutuhkan, termasuk dalam bidang pendidikan. Dana zakat dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan pendidikan, seperti pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu, bantuan operasional sekolah, pengadaan sarana dan prasarana, serta insentif bagi tenaga pendidik di lembaga pendidikan Islam.

Lembaga zakat di Indonesia, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), telah banyak menyalurkan dana zakat untuk pendidikan dalam berbagai bentuk program. Beberapa di antaranya adalah pemberian beasiswa untuk siswa dan mahasiswa dhuafa, pembangunan sekolah berbasis zakat, serta pelatihan keterampilan bagi santri di pesantren. Dengan pemanfaatan yang tepat, zakat mampu memberikan akses pendidikan yang lebih luas bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung.

3. Optimalisasi Wakaf dan Zakat dalam Pendidikan Islam

Agar wakaf dan zakat dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam pendidikan Islam, diperlukan pengelolaan yang transparan, profesional, dan inovatif. Penggunaan teknologi

dalam pengelolaan dana wakaf dan zakat, seperti sistem digital untuk donasi dan pelaporan keuangan, dapat meningkatkan akuntabilitas serta memperluas jangkauan penerima manfaat. Selain itu, sinergi antara lembaga zakat dan wakaf dengan pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat harus terus ditingkatkan agar dana yang terkumpul dapat dimanfaatkan secara lebih efektif.

D. Efisiensi dan Transparansi Pengelolaan Keuangan

Efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pendidikan Islam merupakan elemen penting dalam memastikan penggunaan dana yang optimal serta akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan. Efisiensi berarti bahwa setiap sumber daya keuangan dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung proses pembelajaran, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, serta memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan. Lembaga pendidikan Islam perlu menyusun anggaran secara terencana dan berbasis kebutuhan nyata agar tidak terjadi pemborosan. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah pengelolaan dana berbasis kinerja, di mana alokasi anggaran ditentukan berdasarkan dampak dan manfaat nyata bagi perkembangan pendidikan Islam. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam sistem keuangan, seperti pencatatan digital dan pembayaran nontunai, dapat membantu meningkatkan akurasi serta efisiensi dalam pengelolaan dana.

Di sisi lain, transparansi menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan dari pemerintah, masyarakat, dan donatur terhadap sistem pendidikan Islam. Laporan keuangan harus disusun secara berkala dan dapat diakses oleh pihak-pihak terkait agar penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. Audit keuangan secara rutin, baik oleh lembaga internal maupun eksternal, juga penting untuk memastikan bahwa pengelolaan dana berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan bebas dari penyalahgunaan. Selain itu, lembaga pendidikan Islam harus menerapkan mekanisme transparan dalam penggunaan dana hibah,

zakat, dan wakaf, dengan memberikan laporan rinci mengenai alokasi dan pemanfaatan dana tersebut.

Partisipasi masyarakat juga berperan dalam menjaga transparansi keuangan pendidikan Islam. Dengan adanya mekanisme pengaduan serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, potensi penyimpangan dapat diminimalisir, dan pengelolaan keuangan dapat berjalan lebih akuntabel. Dengan menerapkan prinsip efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, pendidikan Islam dapat terus berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi peserta didik serta masyarakat.

BAB 8

TEKNOLOGI DAN INOVASI DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan Islam. Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan Islam tidak hanya meningkatkan efektivitas proses belajar-mengajar, tetapi juga memperluas akses pendidikan bagi lebih banyak orang. Dengan adanya inovasi dalam metode pembelajaran, sistem administrasi, serta pengelolaan lembaga pendidikan Islam, diharapkan kualitas pendidikan dapat terus meningkat dan mampu menjawab tantangan zaman.

Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi dalam pendidikan Islam adalah digitalisasi pembelajaran. Platform e-learning, aplikasi pendidikan berbasis Islam, serta kelas daring memungkinkan siswa dan santri untuk belajar secara fleksibel tanpa terbatas ruang dan waktu. Madrasah dan pesantren kini mulai mengadopsi Learning Management System (LMS) untuk memfasilitasi interaksi antara guru dan siswa, memberikan materi pembelajaran secara digital, serta melakukan evaluasi secara daring. Selain itu, penggunaan multimedia seperti video interaktif, podcast islami, dan aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) semakin memperkaya pengalaman belajar dan meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi keislaman.

A. Pemanfaatan Teknologi dalam Pendidikan Islam

Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan Islam telah membawa perubahan signifikan dalam metode pembelajaran, pengelolaan administrasi, serta penyebaran ilmu keislaman. Teknologi memungkinkan proses pendidikan menjadi lebih fleksibel, efisien, dan mudah diakses oleh berbagai kalangan, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil. Dengan integrasi teknologi yang tepat, pendidikan Islam dapat berkembang lebih dinamis tanpa kehilangan esensi ajaran Islam yang menjadi dasarnya.

Salah satu penerapan utama teknologi dalam pendidikan Islam adalah penggunaan platform e-learning dan Learning Management System (LMS). Aplikasi seperti Google Classroom, Moodle, dan berbagai platform berbasis Islam memungkinkan siswa, santri, dan mahasiswa untuk mengakses materi pelajaran, mengikuti diskusi daring, serta mengerjakan tugas secara fleksibel. Hal ini sangat membantu dalam meningkatkan akses pendidikan, terutama bagi mereka yang tidak dapat hadir secara fisik di lembaga pendidikan Islam. Selain itu, banyak pesantren dan madrasah yang mulai memanfaatkan teknologi digital untuk mengelola sistem administrasi, termasuk pencatatan data siswa, pengelolaan keuangan, dan evaluasi akademik berbasis komputer.

Di sisi lain, teknologi juga digunakan untuk memperkaya metode pembelajaran dalam pendidikan Islam. Penggunaan multimedia seperti video interaktif, podcast islami, serta simulasi berbasis kecerdasan buatan (AI) memungkinkan penyampaian materi agama menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Misalnya, aplikasi Al-Qur'an digital yang dilengkapi dengan tafsir, terjemahan, dan fitur interaktif membantu siswa memahami makna ayat-ayat suci dengan lebih mendalam. Teknologi juga mendukung pengajaran bahasa Arab dan studi Islam melalui aplikasi yang dirancang khusus untuk pembelajaran interaktif.

Selain itu, media sosial dan platform digital telah menjadi sarana efektif dalam menyebarkan dakwah serta edukasi Islam. Banyak ulama, akademisi, dan lembaga pendidikan Islam yang memanfaatkan media sosial seperti YouTube, Instagram, dan Telegram untuk berbagi kajian keislaman, diskusi ilmiah, serta tanya jawab interaktif. Dengan pendekatan ini, pemahaman Islam dapat tersebar luas ke masyarakat global dan menjangkau generasi muda yang lebih akrab dengan dunia digital.

B. E-Learning dan Digitalisasi Pendidikan Islam

E-learning dan digitalisasi dalam pendidikan Islam telah menjadi solusi inovatif dalam meningkatkan akses, efektivitas, dan fleksibilitas proses pembelajaran. Dengan kemajuan teknologi, metode pembelajaran tradisional kini dapat dikombinasikan dengan platform digital untuk menjangkau lebih banyak peserta didik tanpa batasan ruang dan waktu. Digitalisasi pendidikan Islam mencakup penggunaan e-learning, pengelolaan akademik berbasis teknologi, serta penyebaran ilmu keislaman melalui media digital.

Salah satu bentuk e-learning yang banyak digunakan dalam pendidikan Islam adalah platform pembelajaran daring (Learning Management System/LMS) seperti Google Classroom, Moodle, dan Edmodo. Lembaga pendidikan Islam, mulai dari madrasah, pesantren, hingga perguruan tinggi Islam, telah mengadopsi sistem ini untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh, penyimpanan materi, serta evaluasi akademik secara daring. Selain itu, berbagai aplikasi berbasis Islam, seperti Al-Qur'an digital interaktif, kamus bahasa Arab daring, dan aplikasi kajian keislaman, semakin memperkaya pengalaman belajar bagi para siswa dan mahasiswa.

Digitalisasi pendidikan Islam juga mencakup penggunaan video pembelajaran, podcast islami, serta modul interaktif berbasis kecerdasan buatan (AI). Media sosial dan platform streaming seperti YouTube dan Telegram telah menjadi sarana efektif dalam menyebarkan kajian keislaman, ceramah, dan pelatihan berbasis Islam kepada masyarakat luas. Keberadaan platform ini memungkinkan peserta didik untuk belajar secara mandiri, mengulang materi sesuai kebutuhan, dan berinteraksi dengan ulama atau pendidik dari berbagai penjuru dunia.

Selain mendukung pembelajaran, digitalisasi juga membantu dalam pengelolaan administrasi pendidikan Islam. Sistem informasi akademik berbasis digital mempermudah pencatatan data siswa, sistem keuangan, dan manajemen tenaga pendidik. Dengan sistem yang

lebih transparan dan efisien, lembaga pendidikan Islam dapat meningkatkan kualitas layanan dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan.

C. Integrasi AI dalam Kebijakan Pendidikan Islam

Integrasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam kebijakan pendidikan Islam membawa perubahan signifikan dalam cara pengajaran, evaluasi, serta manajemen pendidikan Islam. Teknologi AI menawarkan berbagai solusi inovatif yang dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran, mempercepat administrasi pendidikan, serta memberikan pengalaman belajar yang lebih personal bagi siswa dan mahasiswa. Dengan pemanfaatan AI, pendidikan Islam dapat lebih adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai keislaman yang menjadi landasannya.

Salah satu penerapan AI dalam pendidikan Islam adalah dalam sistem pembelajaran adaptif (*adaptive learning*). Dengan teknologi ini, sistem dapat menyesuaikan materi dan metode pengajaran sesuai dengan tingkat pemahaman dan kecepatan belajar masing-masing siswa. Aplikasi berbasis AI juga dapat membantu dalam pengajaran bahasa Arab, tafsir Al-Qur'an, dan ilmu keislaman dengan menyediakan fitur interaktif seperti chatbot islami yang mampu menjawab pertanyaan secara otomatis berdasarkan referensi keislaman.

Selain itu, AI juga berperan dalam otomatisasi administrasi pendidikan Islam. Sistem manajemen akademik berbasis AI dapat membantu sekolah, madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam dalam mengelola data siswa, menyusun kurikulum yang lebih efektif, serta melakukan evaluasi akademik secara lebih akurat. Dengan penerapan AI, tugas administratif seperti pembuatan jadwal, pencatatan kehadiran, hingga analisis perkembangan siswa dapat dilakukan secara otomatis, sehingga tenaga pendidik dapat lebih fokus dalam proses pengajaran.

Di bidang evaluasi, AI dapat digunakan untuk melakukan penilaian otomatis terhadap tugas dan ujian siswa. Teknologi pemrosesan bahasa alami (Natural Language Processing/NLP) memungkinkan sistem AI untuk menganalisis jawaban tertulis siswa dalam ujian berbasis esai dan memberikan umpan balik yang sesuai. Hal ini dapat menghemat waktu guru dan meningkatkan objektivitas dalam penilaian.

Selain itu, AI juga memiliki peran penting dalam penyebaran dakwah dan kajian keislaman. Algoritma AI dapat digunakan untuk menyaring dan menyajikan konten islami yang relevan sesuai dengan kebutuhan pengguna di berbagai platform digital, termasuk media sosial, aplikasi dakwah, serta website keislaman. AI juga dapat membantu dalam pengarsipan dan analisis kitab-kitab klasik Islam, sehingga warisan keilmuan Islam dapat diakses dan dipelajari dengan lebih mudah oleh generasi muda.

D. Inovasi Model Pembelajaran Berbasis Islam

Inovasi dalam model pembelajaran berbasis Islam menjadi kebutuhan mendesak di era modern untuk memastikan pendidikan Islam tetap relevan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan zaman. Perkembangan teknologi, perubahan sosial, serta tuntutan globalisasi mendorong lembaga pendidikan Islam untuk mengembangkan metode pembelajaran yang tidak hanya berbasis pada nilai-nilai keislaman, tetapi juga memanfaatkan teknologi dan pendekatan pedagogi modern.

Salah satu inovasi yang berkembang dalam pendidikan Islam adalah **model blended learning**, yaitu kombinasi antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring (e-learning). Model ini memungkinkan siswa dan santri untuk mendapatkan pembelajaran yang fleksibel dengan tetap mempertahankan interaksi langsung dengan guru dan sesama siswa. Platform digital seperti Learning Management System (LMS) juga mulai diterapkan di madrasah dan pesantren untuk memudahkan akses materi, diskusi, serta evaluasi akademik.

Selain itu, **pendekatan STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) berbasis Islam** juga mulai diterapkan di berbagai lembaga pendidikan Islam. Model ini mengintegrasikan ilmu pengetahuan modern dengan ajaran Islam, sehingga siswa tidak hanya memahami sains dan teknologi secara akademis, tetapi juga dapat melihatnya dalam perspektif Islam. Contohnya, dalam pelajaran biologi, siswa dapat mempelajari konsep penciptaan makhluk hidup berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, atau dalam matematika, mereka dapat mempelajari sejarah ilmuwan Muslim seperti Al-Khwarizmi dalam pengembangan aljabar.

Pendekatan lain yang mulai diterapkan adalah **model pembelajaran berbasis proyek (Project-Based Learning/PBL) dalam pendidikan Islam**. Model ini mendorong siswa untuk belajar melalui proyek-proyek nyata yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Misalnya, siswa dapat diberikan tugas untuk membuat program sosial berbasis Islam seperti pengelolaan zakat digital, pengembangan aplikasi belajar Al-Qur'an, atau proyek bisnis syariah sederhana. Metode ini tidak hanya meningkatkan kreativitas dan keterampilan berpikir kritis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Di samping itu, **gamifikasi dalam pendidikan Islam** juga menjadi salah satu inovasi yang menarik. Gamifikasi adalah penerapan elemen permainan dalam proses belajar untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Aplikasi pembelajaran Islam berbasis gamifikasi seperti permainan kuis islami, simulasi haji virtual, dan aplikasi hafalan Al-Qur'an interaktif telah banyak dikembangkan untuk membantu siswa belajar dengan cara yang lebih menyenangkan.

BAB 9

TANTANGAN GLOBAL DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM

Pendidikan Islam di era globalisasi menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi kebijakan dan implementasinya. Perubahan sosial, perkembangan teknologi, serta dinamika ekonomi dan politik global menuntut sistem pendidikan Islam untuk terus beradaptasi agar tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan umat. Tantangan-tantangan ini tidak hanya berdampak pada kurikulum dan metode pembelajaran, tetapi juga pada aspek manajerial, pendanaan, serta regulasi pendidikan Islam di berbagai negara.

Salah satu tantangan utama adalah **arus globalisasi yang membawa perubahan dalam nilai-nilai budaya dan sosial**. Globalisasi menyebabkan munculnya pengaruh budaya asing yang terkadang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam harus mampu menanamkan nilai-nilai keislaman yang kuat kepada peserta didik, sambil tetap membekali mereka dengan keterampilan yang relevan dengan dunia modern. Pendidikan Islam harus mampu menciptakan generasi yang tidak hanya berpengetahuan luas tetapi juga memiliki karakter Islami yang kuat.

A. Isu Globalisasi dan Pengaruhnya terhadap Pendidikan Islam

Globalisasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan Islam. Arus informasi yang semakin cepat, perkembangan teknologi, serta interaksi budaya yang semakin luas memberikan dampak positif maupun negatif terhadap sistem pendidikan Islam. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam perlu merespons isu globalisasi dengan bijak agar tetap relevan dan berdaya saing tanpa mengabaikan nilai-nilai keislaman.

Salah satu pengaruh utama globalisasi terhadap pendidikan Islam adalah **peningkatan akses terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi**. Globalisasi memungkinkan peserta didik dan tenaga pendidik untuk mengakses berbagai sumber belajar dari seluruh dunia, termasuk kitab-kitab klasik Islam, jurnal akademik, serta kajian ilmiah dari para ulama dan akademisi Muslim. Digitalisasi dan e-learning juga mempermudah proses pembelajaran di madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam dengan memanfaatkan platform daring yang memungkinkan pembelajaran lebih fleksibel dan efisien.

Namun, di sisi lain, globalisasi juga membawa tantangan besar, terutama dalam **menjaga identitas pendidikan Islam dari pengaruh budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam**. Masuknya berbagai ideologi sekuler, materialisme, dan liberalisme dalam sistem pendidikan dapat memengaruhi pola pikir generasi muda Muslim. Oleh karena itu, pendidikan Islam perlu memperkuat kurikulum yang menanamkan pemahaman Islam yang kuat, sehingga peserta didik dapat memilah dan memahami informasi dengan perspektif yang islami.

Selain itu, globalisasi juga berpengaruh terhadap **standarisasi pendidikan Islam di tingkat internasional**. Persaingan global menuntut lulusan lembaga pendidikan Islam untuk memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar dunia kerja, baik dalam aspek akademik maupun keterampilan profesional. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam perlu mengadaptasi metode pembelajaran yang lebih inovatif, seperti pendekatan STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) berbasis Islam, pembelajaran berbasis proyek (Project-Based Learning), serta penguatan keterampilan digital.

Dampak globalisasi juga terlihat dalam **persaingan antara lembaga pendidikan Islam dengan sekolah-sekolah umum atau berbasis internasional**. Banyak lembaga pendidikan Islam menghadapi tantangan dalam menarik minat peserta didik, terutama jika kurikulum dan metode pembelajarannya dianggap kurang modern atau tidak memenuhi kebutuhan pasar kerja.

Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam pendidikan Islam agar tetap menarik, kompetitif, dan relevan dengan perkembangan zaman, tanpa mengorbankan nilai-nilai Islam.

Selain itu, globalisasi juga menuntut pendidikan Islam untuk lebih **inklusif dan toleran dalam menghadapi keberagaman**. Pendidikan Islam perlu menanamkan sikap moderasi dan keterbukaan dalam memahami perbedaan budaya, tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasar Islam. Hal ini penting untuk membangun generasi Muslim yang mampu berkontribusi dalam masyarakat global dengan tetap memegang teguh ajaran Islam.

Dalam menghadapi tantangan globalisasi, kebijakan pendidikan Islam harus bersifat adaptif dan strategis. Lembaga pendidikan Islam perlu memanfaatkan teknologi, memperkuat kurikulum yang berbasis nilai-nilai Islam, serta membangun sinergi dengan berbagai institusi global untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan langkah yang tepat, pendidikan Islam tidak hanya mampu bertahan dalam era globalisasi, tetapi juga berperan aktif dalam membentuk peradaban dunia yang berlandaskan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin.

B. Radikalisme dan Moderasi dalam Pendidikan Islam

Radikalisme dan moderasi dalam pendidikan Islam menjadi isu yang semakin mendapat perhatian di era globalisasi. Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membentuk pemahaman agama yang seimbang, sehingga dapat mencegah berkembangnya paham ekstrem yang menyimpang dari nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam harus mampu menanamkan prinsip moderasi (wasathiyah) sebagai bagian dari pembentukan karakter peserta didik.

Radikalisme dalam pendidikan Islam muncul ketika pemahaman agama diajarkan secara sempit dan eksklusif, sehingga melahirkan sikap intoleran terhadap perbedaan. Beberapa faktor yang menyebabkan munculnya radikalisme dalam dunia pendidikan antara lain adalah pemahaman agama yang kurang komprehensif, pemanfaatan pendidikan oleh kelompok

tertentu untuk menyebarkan ideologi ekstrem, serta kurangnya literasi kritis dalam menghadapi informasi yang beredar, terutama di dunia digital. Jika tidak diatasi dengan baik, radikalisme dapat merusak tatanan sosial dan menciptakan ketegangan dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebagai respons terhadap tantangan ini, konsep moderasi Islam (wasathiyah) menjadi pendekatan utama dalam kebijakan pendidikan Islam. Moderasi Islam bukan berarti mengurangi ketegasan dalam beragama, tetapi menekankan pada keseimbangan antara akidah, ibadah, dan muamalah dalam kehidupan. Islam yang moderat menghargai perbedaan, menolak kekerasan, serta mengedepankan dialog dan toleransi dalam berinteraksi dengan sesama.

Penerapan moderasi dalam pendidikan Islam dapat dilakukan melalui beberapa strategi. Pertama, **penguatan kurikulum yang berbasis pada nilai-nilai moderasi**. Pendidikan Islam harus mengajarkan ajaran Islam secara holistik, mencakup aspek aqidah, syariah, dan akhlak, serta memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip toleransi, keadilan, dan kasih sayang dalam Islam. Materi pembelajaran juga harus mencakup sejarah Islam yang menunjukkan bagaimana para ulama dan pemimpin Muslim terdahulu membangun peradaban yang harmonis dengan berbagai komunitas.

Kedua, **penguatan peran guru sebagai agen moderasi**. Guru memiliki peran sentral dalam membentuk pola pikir dan sikap siswa. Oleh karena itu, guru di lembaga pendidikan Islam harus dibekali dengan pemahaman keislaman yang luas, keterampilan pedagogi yang inklusif, serta kemampuan dalam menangkal paham-paham ekstrem yang mungkin berkembang di lingkungan pendidikan.

Ketiga, **pemanfaatan teknologi dalam menyebarkan narasi Islam moderat**. Era digital membawa tantangan baru dalam penyebaran paham radikal, di mana banyak konten ekstrem tersebar di media sosial dan platform digital. Untuk menanggulangi hal ini, pendidikan Islam

harus aktif memanfaatkan teknologi dengan menghadirkan konten-konten yang mengedukasi tentang Islam yang damai, inklusif, dan menghargai keberagaman.

Keempat, **kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam membangun ekosistem pendidikan yang kondusif.** Kebijakan pendidikan Islam harus didukung oleh regulasi yang memastikan bahwa lembaga pendidikan bebas dari ajaran ekstrem. Selain itu, sinergi dengan tokoh agama, organisasi Islam, dan masyarakat luas diperlukan untuk membentuk lingkungan belajar yang sehat dan terbuka bagi dialog.

C. Adaptasi Pendidikan Islam terhadap Revolusi Industri 4.0

Revolusi Industri 4.0 telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan Islam. Era ini ditandai dengan perkembangan pesat teknologi digital, kecerdasan buatan (AI), big data, Internet of Things (IoT), dan otomatisasi yang mengubah cara manusia bekerja, belajar, dan berinteraksi. Pendidikan Islam harus mampu beradaptasi dengan perubahan ini agar tetap relevan dan mampu mencetak generasi Muslim yang berdaya saing global tanpa kehilangan nilai-nilai keislaman.

Salah satu bentuk adaptasi yang perlu dilakukan adalah **digitalisasi sistem pembelajaran.** Penggunaan teknologi seperti e-learning, aplikasi pembelajaran berbasis daring, serta platform digital untuk mengakses literatur Islam dapat memperluas jangkauan pendidikan Islam. Pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi Islam perlu mengintegrasikan teknologi dalam metode pengajaran, baik melalui penggunaan Learning Management System (LMS) maupun aplikasi interaktif berbasis kecerdasan buatan.

Selain itu, revolusi industri 4.0 juga menuntut **pembaharuan kurikulum pendidikan Islam.** Kurikulum harus lebih fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan zaman, dengan menambahkan mata pelajaran berbasis teknologi seperti pemrograman, analisis data, dan kewirausahaan digital yang tetap berlandaskan nilai-nilai Islam. Integrasi antara ilmu agama

dan ilmu sains menjadi hal yang penting agar peserta didik tidak hanya memahami ajaran Islam, tetapi juga memiliki keterampilan yang relevan dengan dunia kerja modern.

Dalam konteks pengajaran, **metode pembelajaran juga perlu diubah agar lebih inovatif dan interaktif**. Pendekatan seperti blended learning (kombinasi pembelajaran daring dan luring), gamifikasi dalam pendidikan Islam, serta penggunaan simulasi berbasis virtual reality (VR) dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Penggunaan teknologi ini juga dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan mendorong partisipasi aktif peserta didik.

Selain dari sisi akademik, **pendidikan Islam juga perlu membangun karakter dan etika digital** bagi peserta didik. Di era digital, informasi dapat diakses dengan mudah, namun tanpa adanya literasi digital yang baik, peserta didik rentan terhadap hoaks, ujaran kebencian, dan penyalahgunaan media sosial. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus mengajarkan prinsip-prinsip etika dalam bermedia digital sesuai dengan ajaran Islam, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap sesama.

Dari sisi tenaga pendidik, **peningkatan kapasitas guru dan dosen dalam bidang teknologi sangat diperlukan**. Guru dan dosen harus diberikan pelatihan dalam penggunaan teknologi pendidikan, manajemen data, serta pengembangan metode pengajaran berbasis digital. Dengan begitu, mereka dapat mengoptimalkan teknologi dalam proses pembelajaran serta memberikan bimbingan yang lebih efektif kepada peserta didik.

Selain itu, **kolaborasi antara lembaga pendidikan Islam dengan industri dan sektor teknologi** juga penting dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. Pendidikan Islam harus mampu menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi dan kewirausahaan berbasis syariah. Kemitraan dengan perusahaan teknologi dapat membantu lembaga pendidikan Islam dalam menyediakan fasilitas modern, program magang, serta peluang kerja bagi lulusannya.

D. Kebijakan Pendidikan Islam dalam Masyarakat Multikultural

Masyarakat multikultural ditandai dengan keberagaman suku, agama, budaya, dan tradisi yang hidup berdampingan dalam satu lingkungan sosial. Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membangun harmoni, toleransi, dan sikap saling menghormati antarindividu dan kelompok. Pendidikan Islam tidak hanya bertujuan untuk membentuk generasi Muslim yang taat beragama, tetapi juga mampu hidup dalam keberagaman dengan semangat inklusivitas dan keterbukaan.

Salah satu aspek penting dalam kebijakan pendidikan Islam di masyarakat multikultural adalah **penguatan nilai-nilai moderasi Islam (wasathiyah)**. Moderasi Islam menekankan sikap keseimbangan, tidak ekstrem dalam pemahaman agama, dan menghargai perbedaan sebagai bagian dari sunnatullah. Dalam hal ini, kurikulum pendidikan Islam harus dirancang untuk menanamkan nilai-nilai toleransi, kasih sayang, serta penghormatan terhadap hak-hak individu dari berbagai latar belakang budaya dan keyakinan.

Selain itu, **pendekatan pendidikan berbasis inklusivitas** juga menjadi bagian dari kebijakan pendidikan Islam dalam masyarakat multikultural. Lembaga pendidikan Islam harus membuka ruang bagi dialog antaragama dan antarbudaya guna mempererat hubungan sosial dan mengurangi potensi konflik. Program-program seperti kajian lintas agama, studi perbandingan agama, serta kegiatan sosial bersama antarumat beragama dapat menjadi sarana efektif untuk membangun sikap saling pengertian dan menghormati.

Dari sisi kebijakan, pemerintah dan lembaga pendidikan Islam perlu memastikan bahwa **kurikulum pendidikan tidak mengandung unsur diskriminatif** terhadap kelompok tertentu. Materi ajar harus menampilkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin, yang mengajarkan keadilan, persaudaraan, dan keterbukaan terhadap perbedaan. Pendidikan Islam

juga harus mengajarkan sejarah peradaban Islam yang menunjukkan bagaimana umat Islam di berbagai era mampu hidup berdampingan dengan masyarakat dari berbagai latar belakang.

Selain itu, **peran guru sebagai fasilitator pendidikan multikultural sangatlah penting.** Guru harus memiliki pemahaman mendalam tentang keberagaman serta mampu menyampaikan ajaran Islam dengan pendekatan yang tidak eksklusif. Pelatihan bagi pendidik dalam bidang pendidikan multikultural perlu diperkuat agar mereka dapat membimbing peserta didik untuk memahami dan mengapresiasi perbedaan tanpa kehilangan jati diri sebagai Muslim.

Dalam aspek sosial, pendidikan Islam juga harus mengajarkan **konsep ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama Muslim), ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sebangsa), dan ukhuwah insaniyah (persaudaraan sesama manusia).** Dengan memahami ketiga konsep ini, peserta didik dapat tumbuh menjadi individu yang memiliki kecintaan terhadap sesama, berkontribusi dalam pembangunan bangsa, serta menjaga harmoni dalam kehidupan sosial.

Teknologi juga dapat dimanfaatkan dalam kebijakan pendidikan Islam untuk mendukung pembelajaran multikultural. **Platform digital dan media sosial dapat digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan narasi Islam yang damai, edukatif, dan terbuka terhadap perbedaan.** Selain itu, kolaborasi dengan berbagai institusi pendidikan, baik nasional maupun internasional, dapat membuka wawasan peserta didik tentang bagaimana Islam berkembang dalam berbagai budaya di seluruh dunia.

Dengan kebijakan pendidikan Islam yang mengakomodasi keberagaman, diharapkan generasi Muslim dapat tumbuh menjadi individu yang berwawasan luas, toleran, serta mampu berkontribusi dalam membangun masyarakat yang harmonis. Pendidikan Islam yang inklusif

dan moderat akan semakin memperkokoh eksistensinya dalam masyarakat multikultural serta memperkuat peran Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam.

BAB 10

KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM

Pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk individu yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Sejak awal perkembangannya, pendidikan Islam telah menjadi instrumen utama dalam membangun peradaban umat Islam, baik dari segi keilmuan maupun moral. Dalam konteks modern, pendidikan Islam dihadapkan pada berbagai tantangan global, seperti perkembangan teknologi, modernisasi, serta perubahan sosial dan budaya. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam perlu dirumuskan dengan cermat agar tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan zaman.

A. Reformasi dan Transformasi Pendidikan Islam

Pendidikan Islam telah mengalami berbagai perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Reformasi dan transformasi pendidikan Islam merupakan upaya untuk menyesuaikan sistem pendidikan dengan tuntutan era modern, tanpa menghilangkan nilai-nilai fundamental Islam. Reformasi pendidikan Islam melibatkan perubahan dalam kebijakan, kurikulum, metode pembelajaran, serta tata kelola lembaga pendidikan agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Transformasi pendidikan Islam juga mencakup pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran, seperti e-learning, digitalisasi materi ajar, serta integrasi kecerdasan buatan dalam sistem pendidikan. Selain itu, pendekatan pendidikan yang lebih inklusif dan berbasis riset juga menjadi bagian dari transformasi ini. Tujuannya adalah agar pendidikan Islam tidak hanya menjadi pusat pengembangan ilmu keislaman, tetapi juga mampu melahirkan generasi Muslim yang kompetitif, berdaya saing global, serta memiliki wawasan luas dalam berbagai disiplin ilmu.

Upaya reformasi dan transformasi pendidikan Islam harus dilakukan secara sistematis, mulai dari kebijakan pemerintah, peran lembaga pendidikan, hingga partisipasi aktif masyarakat. Dengan adanya reformasi yang tepat, pendidikan Islam dapat terus berkembang dan berkontribusi dalam membangun peradaban yang lebih maju, berkeadilan, serta tetap berlandaskan nilai-nilai Islam.

B. Sinergi Pendidikan Islam dengan Pendidikan Umum

Pendidikan Islam dan pendidikan umum memiliki peran penting dalam membentuk individu yang tidak hanya memiliki pemahaman keagamaan yang kuat, tetapi juga memiliki kompetensi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Sinergi antara keduanya menjadi suatu keharusan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan zaman.

Integrasi antara pendidikan Islam dan pendidikan umum dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti penggabungan nilai-nilai Islam dalam kurikulum pendidikan umum, penerapan metode pembelajaran modern dalam madrasah dan pesantren, serta kolaborasi antara lembaga pendidikan Islam dengan institusi akademik lainnya. Model pendidikan berbasis integrasi ini telah diterapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia, yang mengembangkan sistem pendidikan madrasah, sekolah Islam terpadu, serta perguruan tinggi Islam yang mengajarkan ilmu agama dan ilmu umum secara seimbang.

Sinergi ini juga mencakup pengembangan kurikulum yang holistik, yang tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga spiritual dan moral. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya dibekali dengan keterampilan akademik dan profesional, tetapi juga memiliki karakter yang kuat berdasarkan ajaran Islam. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam pendidikan Islam juga semakin memperkuat sinergi ini, memungkinkan pembelajaran yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

C. Rekomendasi Kebijakan untuk Kemajuan Pendidikan Islam

Untuk memastikan pendidikan Islam tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman, diperlukan kebijakan yang progresif dan berorientasi pada pengembangan kualitas. Berikut beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk kemajuan pendidikan Islam:

1. Penguatan Kurikulum Berbasis Integrasi

Kurikulum pendidikan Islam perlu dirancang secara integratif dengan ilmu pengetahuan umum, sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki keseimbangan antara keilmuan agama dan keterampilan duniawi. Pendekatan ini akan membentuk generasi yang tidak hanya cakap dalam ilmu keislaman, tetapi juga siap menghadapi persaingan global.

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kualitas tenaga pendidik dalam pendidikan Islam harus terus ditingkatkan melalui pelatihan, sertifikasi, dan program pengembangan profesional yang berkelanjutan. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu menyediakan fasilitas dan dukungan bagi para pendidik agar mampu menerapkan metode pembelajaran yang inovatif dan efektif.

3. Digitalisasi dan Pemanfaatan Teknologi

Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan Islam harus diperluas, termasuk pengembangan platform e-learning, aplikasi pendidikan berbasis Islam, serta integrasi kecerdasan buatan dalam proses pembelajaran. Digitalisasi ini akan memungkinkan akses pendidikan yang lebih luas dan fleksibel bagi semua kalangan.

4. Dukungan Kebijakan dan Regulasi yang Berpihak pada Pendidikan Islam

Pemerintah perlu memperkuat kebijakan dan regulasi yang mendukung perkembangan

pendidikan Islam, termasuk dalam aspek pendanaan, akreditasi lembaga pendidikan, serta pemberian insentif bagi lembaga yang mengadopsi inovasi dalam sistem pendidikannya.

5. Peningkatan Kolaborasi dengan Berbagai Pihak

Pendidikan Islam perlu membangun kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan umum, sektor industri, organisasi internasional, serta masyarakat. Kolaborasi ini akan membantu dalam pengembangan kurikulum, penyediaan sumber daya, serta menciptakan peluang kerja bagi lulusan pendidikan Islam.

6. Pemberdayaan Pesantren dan Madrasah sebagai Pusat Keunggulan

Pesantren dan madrasah sebagai pilar utama pendidikan Islam harus dikembangkan menjadi pusat keunggulan, baik dalam bidang akademik, riset, maupun pengembangan keterampilan. Revitalisasi manajemen lembaga, peningkatan fasilitas, serta penguatan jejaring global akan mendukung transformasi ini.

D. Visi Pendidikan Islam dalam Membangun Peradaban

Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membangun peradaban yang berlandaskan nilai-nilai keislaman dan kemajuan ilmu pengetahuan. Visi pendidikan Islam tidak hanya terbatas pada pembentukan individu yang saleh secara spiritual, tetapi juga berorientasi pada pengembangan masyarakat yang maju, berkeadilan, dan berdaya saing global.

Salah satu aspek utama dalam visi pendidikan Islam adalah menciptakan generasi yang memiliki keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu dunia. Pendidikan Islam harus mampu melahirkan individu yang tidak hanya memiliki pemahaman mendalam terhadap ajaran Islam, tetapi juga menguasai berbagai disiplin ilmu, teknologi, serta keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Dengan demikian, lulusan pendidikan Islam dapat berkontribusi

dalam berbagai bidang, mulai dari ekonomi, politik, hingga teknologi, tanpa meninggalkan identitas keislamannya.

Selain itu, pendidikan Islam harus menjadi motor penggerak dalam membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai moral, keadilan, dan kemanusiaan. Dalam era globalisasi, tantangan seperti materialisme, sekularisme, dan ketimpangan sosial harus dihadapi dengan pendekatan pendidikan yang berorientasi pada kebijaksanaan, etika, dan pemikiran kritis. Oleh karena itu, sistem pendidikan Islam harus terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman, tanpa kehilangan esensi dan ruh keislamannya.

Pendidikan Islam juga memiliki visi untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis dalam keberagaman. Islam mengajarkan pentingnya toleransi dan dialog antarperadaban, sehingga sistem pendidikan harus menanamkan nilai-nilai tersebut kepada peserta didik. Dengan cara ini, pendidikan Islam dapat menjadi alat yang efektif dalam membangun perdamaian dan memperkuat persaudaraan umat manusia.

Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan kebijakan pendidikan yang holistik dan inovatif, yang mencakup kurikulum berbasis integrasi, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Dengan langkah-langkah strategis ini, pendidikan Islam akan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas dan berakhlak, tetapi juga mampu berkontribusi secara aktif dalam membangun peradaban yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Baidlowi. "Modernisasi Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Islam dan Perubahan Sosial*, vol. 4, no. 1, 2022, pp. 55-70.
- Ahmad Fauzi. "Paradigma Baru dalam Kebijakan Pendidikan Islam." *Jurnal Studi Islam*, vol. 3, no. 1, 2020, pp. 60-75.
- Alfian Trikuntoro. "Manajemen Mutu Pendidikan Islam." *Jurnal Kependidikan*, vol. 7, no. 1, 2019, pp. 33-45.
- Ali Mansur. "Strategi Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam di Lembaga Pendidikan Formal dan Nonformal." *Jurnal Kebijakan Pendidikan Islam Modern*, vol. 5, no. 2, 2020, pp. 88-103.
- Andi Rukmana. "Politik dan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia." *Jurnal Politik Islam dan Pendidikan*, vol. 6, no. 1, 2021, pp. 55-70.
- Dedi Nurhadi. "Pendidikan Islam Berbasis Karakter dan Kebijakan Nasional." *Jurnal Studi Pendidikan Islam Berkelanjutan*, vol. 2, no. 1, 2019, pp. 22-38.
- Dwi Santoso. "Pendidikan Islam dan Kebijakan Kurikulum Nasional." *Jurnal Kurikulum Pendidikan Islam*, vol. 7, no. 1, 2018, pp. 33-50.
- Eka Prasetya. "Kebijakan Pendidikan Islam dalam Konteks Multikulturalisme." *Jurnal Multikulturalisme Islam*, vol. 9, no. 2, 2018, pp. 112-127.
- Eko Purnomo dan Novita Loka. "Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Menghadapi Era Society 5.0." *Jurnal Shimfonia*, vol. 3, no. 1, 2023, pp. 15-25.
- Fadli Rahman. "Konsep Pendidikan Islam dalam Kebijakan Nasional." *Jurnal Ilmu Keislaman dan Kebijakan Pendidikan*, vol. 5, no. 2, 2021, pp. 89-104.
- Febri Giantara dan Reni Amiliya. "Urgensi Kebijakan Pendidikan Islam sebagai Bagian dari Kebijakan Publik (Analisis Teoretis)." *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, vol. 11, no. 2, 2021, pp. 123-130.
- Hanafy Syahputra. "Sejarah dan Perkembangan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Islam*, vol. 6, no. 1, 2017, pp. 45-59.
- Hidayatullah. "Pendidikan Islam dan Pembangunan Nasional: Perspektif Kebijakan Publik." *Jurnal Pembangunan Islam*, vol. 8, no. 1, 2017, pp. 145-160.
- Iqbal Ramadhan. "Pendidikan Islam dan Globalisasi: Implikasi terhadap Kebijakan Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Global Islam*, vol. 5, no. 1, 2019, pp. 43-58.
- Lailatul Qodariah. "Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia: Antara Teori dan Praktik." *Jurnal Pengembangan Pendidikan Islam*, vol. 8, no. 2, 2020, pp. 135-150.

- Moh. Rifai. "Kebijakan Pendidikan Islam dalam Era Otonomi Daerah." *Jurnal At-Tanzim*, vol. 1, no. 1, 2017, pp. 45-56.
- Muhammad Emnis Anwar. "Menelusuri Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan*, vol. 3, 2014, pp. 67-80.
- Muhammad Zain. "Reformasi Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Pendidikan Islam dan Sosial*, vol. 6, no. 1, 2021, pp. 66-80.
- Nurhadi. "Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam di Sekolah Berbasis Pesantren." *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, vol. 8, no. 1, 2018, pp. 112-125.
- Rasyid Ridwan. "Kebijakan Pendidikan Islam dan Tantangan Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Pendidikan Islam 4.0*, vol. 7, no. 2, 2022, pp. 50-68.
- Rini Oktaviani. "Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam di Perguruan Tinggi." *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, vol. 9, no. 3, 2019, pp. 130-145.
- Rizki Maulana. "Tantangan dan Peluang Kebijakan Pendidikan Islam dalam Era Digital." *Jurnal Pendidikan Islam Kontemporer*, vol. 2, no. 2, 2021, pp. 210-225.
- Rukayah dan Syaiful Anwar. "Kebijakan Pendidikan Islam: Analisis Kritis terhadap Sistem Pendidikan Nasional." *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, vol. 4, no. 2, 2019, pp. 97-112.
- Salim Hasan. "Dinamika Kebijakan Pendidikan Islam dan Transformasi Sosial." *Jurnal Sosial Keislaman*, vol. 7, no. 3, 2021, pp. 123-138.
- Samsuriadi. "Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia." *Jurnal Tarbawi*, vol. 2, no. 2, 2016, pp. 181-190.
- Siti Fatimah. "Dinamika Kebijakan Pendidikan Islam dalam Perspektif Politik." *Jurnal Sosiologi Islam*, vol. 4, no. 3, 2019, pp. 78-92.
- Suparman. "Kebijakan Pendidikan Islam: Tinjauan Filosofis dan Historis." *Jurnal Filsafat Islam*, vol. 3, no. 2, 2018, pp. 77-89.
- Yusuf Al-Hakim. "Kebijakan Pendidikan Islam di Era Otonomi Daerah." *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam*, vol. 6, no. 2, 2017, pp. 102-118.
- Zainal Abidin. "Efektivitas Kebijakan Pendidikan Islam dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia." *Jurnal Pembangunan Pendidikan Islam*, vol. 3, no. 1, 2020, pp. 78-91.
- Zulkifli Ahmad. "Transformasi Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 5, no. 2, 2020, pp. 90-102.

PROFIL PENULIS



Saya Prof. Dr. H. Anis Fauzi, M.SI., lahir di Serang pada tanggal 28 Oktober 1967. Pendidikan S-1 diselesaikan di Jurusan Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung pada tahun 1991. Pendidikan S-2 diselesaikan di Program Studi Magister Studi Islam (Konsentrasi Pendidikan Islam) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta pada tahun 2002. Pendidikan S-3 diselesaikan di Program Studi Ilmu Pendidikan (Konsentrasi Manajemen Pendidikan) Program Doktor Ilmu Pendidikan Universitas Islam Nusantara Bandung pada tahun 2012.

Pada tahun ajaran 1991 sampai dengan 1994, mengajar Mata Pelajaran Geografi di MAN 2 Kota Serang. Kemudian dari tahun 1994 hingga tahun 1998 mengajar Mata Pelajaran Geografi dan juga Antropologi di SMA Negeri 2 Krakatau Steel Cilegon. Sejak tahun 1998 hingga tahun 2002 mengajar Mata Pelajaran IPS/Geografi dan juga IPS/Ekonomi di SMP Negeri 5 Kota Serang. Pada tahun ajaran 1991-1992 mengajar Mata Pelajaran Geografi di SMA Negeri 1 Ciruas dan juga SMA Negeri 1 Pabuaran Kabupaten Serang. Pada tahun 1992 hingga tahun 1998 mengajar Mata Pelajaran Geografi di SMA PGRI 1 Kota Serang. Sejak tahun 1993 hingga tahun 2002 menjadi Dosen Tetap di Institut Agama Islam Banten (IAIB) Serang dalam mata kuliah Bahasa Inggris. Sejak tahun 2002 hingga sekarang menjadi Dosen Tetap Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten dalam mata kuliah Metodologi Studi Islam (2002 -2012) kemudian pindah bidang keahlian kedalam mata kuliah Ilmu dan Manajemen Pendidikan. Jabatan akademik Asisten Ahli diperoleh pada tahun 1995, jabatan akademik Lektor Muda diperoleh pada tahun 1997, dan jabatan akademik Lektor Madya

diperoleh pada tahun 2000, yang ditetapkan oleh Koordinator Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten. Setelah melakukan mutasi lintas departemen, dari Pegawai Departemen Dalam Negeri (sebagai pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Serang) ke Pegawai Departemen Agama, dan ditugaskan ke Kampus STAIN “Sultan Sultan Maulana Hasanuddin Banten” Serang pada tahun 2002, kemudian jabatan akademiknya ditetapkan kembali oleh sebagai Asisten Ahli oleh Ketua STAIN “Sultan Maulana Hasanuddin Banten” Serang pada tahun 2003. Kemudian jabatan akademik Lektor diperoleh pada tahun 2005. Jabatan akademik Lektor Kepala diperoleh pada tahun 2007. Terhitung sejak tanggal 1 September 2024 jabatan akademiknya dinaikan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menjadi Guru Besar/Profesor dalam bidang kepakaran Politik dan Kebijakan Pendidikan di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Karya tulis dalam bentuk artikel ilmiah yang terbit di jurnal nasional terakreditasi Sinta 2 ada Sepuluh artikel, Terakreditasi Sinta 3 ada Sepuluh artikel, dan Terakreditasi Sinta 4 ada Tiga Belas artikel, dan Terakreditasi Sinta 5 ada Enam Belas artikel. Artikel yang terbit di jurnal internasional terindeks ada 10 artikel, dan artikel yang terbit di jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus ada Tiga artikel. Buku Daras ada Empat buku, buku referensi ada dua buku, dan buku Monografi ada Tujuh buku.

PROFIL PENULIS



Saya Prof. Dr. H. Anis Fauzi, M.SI., lahir di Serang pada tanggal 28 Oktober 1967. Pendidikan S-1 diselesaikan di Jurusan Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung pada tahun 1991. Pendidikan S-2 diselesaikan di Program Studi Magister Studi Islam (Konsentrasi Pendidikan Islam) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta pada tahun 2002. Pendidikan S-3 diselesaikan di Program Studi Ilmu Pendidikan (Konsentrasi Manajemen Pendidikan) Program Doktor Ilmu Pendidikan Universitas Islam Nusantara Bandung pada tahun 2012.

Pada tahun ajaran 1991 sampai dengan 1994, mengajar Mata Pelajaran Geografi di MAN 2 Kota Serang. Kemudian dari tahun 1994 hingga tahun 1998 mengajar Mata Pelajaran Geografi dan juga Antropologi di SMA Negeri 2 Krakatau Steel Cilegon. Sejak tahun 1998 hingga tahun 2002 mengajar Mata Pelajaran IPS/Geografi dan juga IPS/Ekonomi di SMP Negeri 5 Kota Serang. Pada tahun ajaran 1991-1992 mengajar Mata Pelajaran Geografi di SMA Negeri 1 Ciruas dan juga SMA Negeri 1 Pabuaran Kabupaten Serang. Pada tahun 1992 hingga tahun 1998 mengajar Mata Pelajaran Geografi di SMA PGRI 1 Kota Serang. Sejak tahun 1993 hingga tahun 2002 menjadi Dosen Tetap di Institut Agama Islam Banten (IAIB) Serang dalam mata kuliah Bahasa Inggris. Sejak tahun 2002 hingga sekarang menjadi Dosen Tetap Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten dalam mata kuliah Metodologi Studi Islam (2002 -2012) kemudian pindah bidang keahlian kedalam mata kuliah Ilmu dan Manajemen Pendidikan. Jabatan akademik Asisten Ahli diperoleh pada tahun 1995, jabatan akademik Lektor Muda diperoleh pada tahun 1997, dan jabatan akademik Lektor Madya diperoleh pada tahun 2000, yang ditetapkan oleh Koordinator Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten. Setelah melakukan mutasi lintas departemen, dari Pegawai Departemen Dalam Negeri (sebagai pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Serang) ke Pegawai Departemen Agama, dan ditugaskan ke Kampus STAIN “Sultan Sultan Maulana Hasanuddin Banten”

Serang pada tahun 2002, kemudian jabatan akademiknya ditetapkan kembali oleh sebagai Asisten Ahli oleh Ketua STAIN “Sultan Maulana Hasanuddin Banten” Serang pada tahun 2003. Kemudian jabatan akademik Lektor diperoleh pada tahun 2005. Jabatan akademik Lektor Kepala diperoleh pada tahun 2007. Terhitung sejak tanggal 1 September 2024 jabatan akademiknya dinaikan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menjadi Guru Besar/Profesor dalam bidang kepakaran Politik dan Kebijakan Pendidikan di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Karya tulis dalam bentuk artikel ilmiah yang terbit di jurnal nasional terakreditasi Sinta 2 ada Sepuluh artikel, Terakreditasi Sinta 3 ada Sepuluh artikel, dan Terakreditasi Sinta 4 ada Tiga Belas artikel, dan Terakreditasi Sinta 5 ada Enam Belas artikel. Artikel yang terbit di jurnal internasional terindeks ada 10 artikel, dan artikel yang terbit di jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus ada Tiga artikel. Buku Daras ada Empat buku, buku referensi ada dua buku, dan buku Monografi ada Tujuh buku

SINOPSIS

Buku *Kebijakan Pendidikan Islam* membahas secara komprehensif mengenai arah, dasar, dan implementasi kebijakan dalam sistem pendidikan Islam. Buku ini menyajikan landasan filosofis, historis, dan normatif dari kebijakan pendidikan Islam, serta bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan dan dijalankan dalam konteks negara modern, khususnya di Indonesia.

Dengan pendekatan multidisipliner, penulis mengulas dinamika hubungan antara negara, agama, dan pendidikan. Buku ini juga menyoroti tantangan-tantangan aktual seperti globalisasi, sekularisasi, serta tuntutan kualitas dan relevansi pendidikan Islam di era kontemporer. Tak hanya membahas aspek teoretis, buku ini juga dilengkapi dengan studi kasus dan analisis kebijakan pendidikan Islam dari berbagai negara Muslim.

KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM

Buku Kebijakan Pendidikan Islam menyajikan pemahaman yang komprehensif tentang landasan, dinamika, serta arah strategis kebijakan pendidikan Islam di berbagai era dan konteks. Buku ini mengkaji secara mendalam konsep dasar pendidikan Islam, mulai dari prinsip-prinsip filosofis hingga implementasi praktisnya dalam bentuk kebijakan pendidikan yang relevan dan kontekstual. Setiap bab dalam buku ini memperkaya pembaca dengan perspektif historis, regulatif, kurikuler, hingga peran penting guru dan lembaga pendidikan dalam mendukung kebijakan pendidikan Islam. Tidak hanya membahas teori, buku ini juga menyoroti tantangan global, integrasi teknologi, serta inovasi pendidikan berbasis nilai-nilai Islam di era digital. Dengan pendekatan sistematis dan analitis, buku ini sangat cocok untuk dosen, mahasiswa, praktisi pendidikan, dan pembuat kebijakan yang ingin memahami lebih dalam tentang pengembangan pendidikan Islam yang berdaya saing dan berakar kuat pada nilai-nilai keislaman.



IKAPI
IKATAN PENERBIT INDONESIA

Penerbit buku yang memajukan literasi dan kreativitas dengan menyediakan platform terjangkau bagi penulis berbakat dari berbagai latar belakang

Office Yogyakarta : 087777899993
Marketing 1 : 088221740145
Marketing 2 : 085961447209
Marketing 3 : 0882005806664
Instagram : @ypad_penerbit
Website : <https://ypad.store>
Email : teampenerbit@ypad.store

